

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 20 DAN 26 SEPTEMBER 2016



TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (I)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RAPERDA PERUBAHAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2016**

Hari : SELASA
Tanggal : 20 September 2016
Waktu : 09.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
1. Pembukaan;
 2. Penjelasan Bupati Rembang tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;
 3. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. GUNASIH, S.E.
 2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Demokrat	: 4 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 6 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	: 33 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Demokrat	: 4 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	: 12 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, S.E.**

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat	Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang saya hormati	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Pj. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Pimpinan Partai Politik, LSM, wartawan dan semua undangan yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Mengawali rapat paripurna ini, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat, rahmah dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini Selasa tanggal 20 September 2016 kita dapat melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Mudah-mudahan Rapat Paripurna ini berjalan lancar dan dalam pembahasannya senantiasa memperhatikan situasi, kondisi dan kepentingan umum, khususnya kepentingan masyarakat Kabupaten

Rembang, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Rembang dapat berhasil dengan baik.

Amin Ya Robbal Alamiin

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, menyebutkan “ *rapat paripurna untuk menetapkan peraturan daerah dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD* “.

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 33 orang. Dengan demikian kuorum dalam rapat paripurna hari ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucapkan “*Bismillahirrohmanirrohim*” tepat pukul 11.30 WIB rapat paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia

Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 5 September 2016, rapat paripurna ini adalah rapat paripurna pertama dari tiga rapat paripurna yang

diagendakan dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Untuk menyingkat waktu, selengkapnya akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;
3. Penutup.

Peserta rapat dan hadirin yang saya hormati.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu " *Penjelasan Bupati atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016*".

Kepada Bupati Rembang, Saudara H. Abdul Hafidz dipersilahkan.

**=== PENJELASAN BUPATI ATAS RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG T.A 2016 ===**

➤ (*Penjelasan Bupati atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 terlampir*)

Terima kasih Saudara Bupati atas penjelasannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat

Demikian tadi, telah kita dengar bersama penjelasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016

yang disampaikan oleh Saudara Bupati Rembang. Dengan telah disampaikannya penjelasan Raperda, maka selesai sudah acara dalam rapat paripurna pertama ini.

Selanjutnya, setelah rapat paripurna ini akan dilaksanakan rapat fraksi-fraksi untuk menyusun pemandangan umum terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, yang akan disampaikan dalam rapat paripurna kedua pada hari ini juga Selasa tanggal 20 September 2016.

Akhirnya terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat pada hari ini.

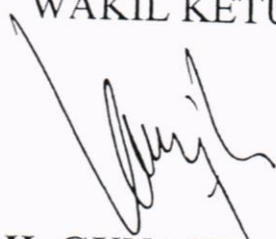
Dengan mengucapkan "*Alhamdulillahillobb il 'alamiin*" tepat pukul 11.55 Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

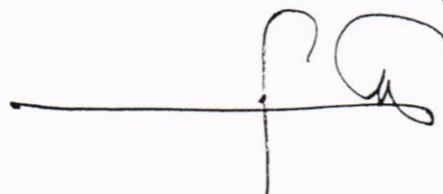
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA,



H. GUNASIH, S.E.

SEKRETARIS,



Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pengantar Nota Keuangan tentang Raperda
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
- LAMPIRAN III : Penjelasan Bupati atas Raperda Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2016.

**DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA I
PENJELASAN BUPATI ATAS RAPERDA PERUBAHAN APBD TH 2016**

HARI/TANGGAL : SELASA , 20 SEPTEMBER 2016
PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	C
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M MURSYID, S.T	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYTM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	WASIMAN	Anggota	23	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24	

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M	Anggota	30	
31	FRIDA IRLANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BHAUD DUROR, Spi	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, MSi	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, S.H	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd	Anggota	44	
45	NUR JANNAH	Anggota	45	

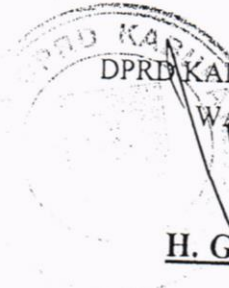
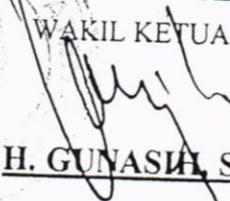
Keterangan :

1 I : Ijin

2 S : Sakit

3 C : Cuti

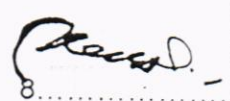
4 DL : Dinas Luar


 DPRD KABUPATEN REMBANG
 WAKIL KETUA,

H. GUNASIH, S.E

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
PENJELASAN BUPATI ATAS RAPERDA PERUBAHAN APBD TH 2016

HARI : SELASA , 20 SEPTEMBER 2016

PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO,S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3		Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4	<u>BamGang S</u>	Pengadilan Negeri Rembang	4. 
5		Dandim 0720 Rembang	5.
6	<u>M. IMRON ROSADI</u>	Kepolisian Resort Rembang	6. 
7		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Ir. HARI SUSANTO,M.Si	Pj Sekretaris Daerah	8. 



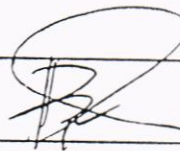
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
PENJELASAN BUPATI ATAS RAPERDA PERUBAHAN APBD TH 2016

HARI : SELASA , 20 SEPTEMBER 2016

PUKUL : 09.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG		1
2	CAMAT KALIORI		2
3	CAMAT SUMBER		3
4	CAMAT SULANG		4
5	CAMAT BULU		5
6	CAMAT PAMOTAN		6
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE		8
9	CAMAT LASEM		9
10	CAMAT PANCUR		10
11	CAMAT SEDAN		11
12	CAMAT SLUKE	<i>Subayanto</i>	12 
13	CAMAT KRAGAN		13
14	CAMAT SARANG		14

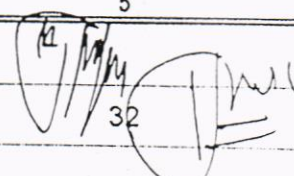
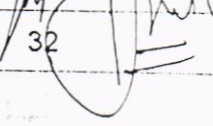
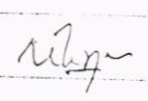
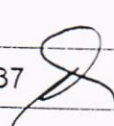
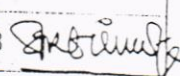
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG


Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
PENJELASAN BUPATI ATAS RAPERDA PERUBAHAN APBD TH 2016**

HARI : SELASA , 20 SEPTEMBER 2016
PUKUL : 09.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Noor Effendi	STB	1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Alex sanda		8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	Johan N	Humas	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Contrato		11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ADM. KEUANGAN	Tri Hartono		14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN			15
16	BAG. UMUM	Sumi		16
17	DPPKAD	Mubri		17
18	INSPEKTORAT			18
19	BAPPEDA			19
20	BPMPKB	Dwi U.		20
21	B K D			21
22	BKP & P4K	Murh	Kasub Ken	22
23	B P B D	Anjok	Sele	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM			24
25	DINAS KESEHATAN	Ag Faliel	DKK	25
26	DINAS PENDIDIKAN	Noor Effendi	PK Kadus	26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	Murtah	Kode	27
28	DINTANHUT	Suratnir		28
29	DINLUTKAN			29
30	DISHUBKOMINFO	Supri	K. Amr.	30

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
31	DINAS DUKCAPIL			31 
32	DINSOSNAKERTRANS	H KUALI Wyo		32 
33	DINBUDPARPORA			33
34	DINAS ENERGI & SDM			34
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Purwandhi Samsi	ka	35 
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARPONO	Karby.	36 
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Edi W	ka. Pustaka	37 
38	KANTOR KPPT	Ety Purbiyanti	Ka. TV	38 
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	Agus Sutopo		39 
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41
42	P D A M			42
43	PERCETAKAN DAERAH			43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			50
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG			52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60
61	B P N KAB. REMBANG			61
62	KANTOR PAJAK			62
63	UP3AD (ASET DAERAH)			63
64	KANTOR PELABUHAN			64

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG			65
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN			71
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG			74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB	Zandi	W Sek	83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA	Mulyanto	SM -	85
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM			87
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT	A. MUSLICH M		92
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95		Aga a	Ta Fies	95

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96	Polres	MARJUKI	Re Inkuir	96
97	---	NAWAWI	---	97
98	PLT Lt Kolonel L. S. S.	soeharto	PLT. D.	98
99	Kadisa	Agus	lat	99
100	A. MUKHLIS M.	M D		100
101	H. Heri Adi	Media Bhayangkara	Jurnal	101
102	Angga T.	Angga T.		102
103				103
104				104
105				105
106				106
107				107
108				108
109				109
110				110
111				111
112				112
113				113
114				114
115				115
116				116
117				117
118				118
119				119
120				120
121				121
122				122
123				123
124				124
125				125

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF

NIP. 19620304 198803 1 011



P E N G A N T A R
N O T A K E U A N G A N

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG



TAHUN ANGGARAN
2016



BUPATI REMBANG

PENGANTAR NOTA KEUANGAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

- Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;
- Yang saya hormati, Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Yang saya hormati, Sdr. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
- Yang saya hormati, Sdr. Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, perkenankanlah saya mengajak hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah Nya, kita semua dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Hadirin Sidang Dewan yang saya hormati

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 ini telah kita awali dengan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 yang penyusunannya berpedoman kepada :

1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 019.6/496/2016 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
10. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 019.6/497/2016 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Hadirin Sidang Dewan yang saya hormati,

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat;
5. Keadaan luar biasa.

Adanya Kebijakan Pemerintah sebagai dasar terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 66 tahun 2016 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016

2. Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor 10/PMK.07/2016 tentang pengurangan/pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 'Secara Mandiri Tahun Anggaran 2016
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016
4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-579/PK/2016 tentang Penyampaian Informasi Kepada Daerah tentang Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Tahun Anggaran 2016
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Jawa Tengah dalam Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa kepada Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 telah memenuhi syarat dalam Kebijakan Umum Anggaran untuk disusunnya Perubahan APBD, maka langkah yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Rembang adalah :

1. Penyesuaian Pendapatan Daerah
2. Penyesuaian dan Pergeseran Anggaran Belanja Daerah
3. Penyesuaian Penerimaan Pembiayaan Daerah (SiLPA) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015

Berikut saya sampaikan Perubahan Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Rembang Kabupaten Tahun Anggaran 2016 :

PENDAPATAN DAERAH

Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula sebesar Rp.180.807.678.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.36.156.249.644,00 atau 20% sehingga menjadi Rp.216.963.928.144,00 dengan rincian:
 - Pajak Daerah sebesar Rp.41.678.500.000,00
 - Retribusi Daerah sebesar Rp.20.743.370.500,00
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.6.564.456.000,00
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.147.977.601.644,00
2. Dana Perimbangan semula Rp.970.288.185.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.117.193.243.422,00 sehingga menjadi Rp.853.094.941.578,00 dengan rincian:
 - Dana Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak berkurang sebesar Rp.6.602.760.000,00 sehingga menjadi Rp.21.449.240.000,00
 - Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang sebesar Rp.113.580.494.422,00 sehingga menjadi Rp.671.800.490.578,00
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik berkurang sebesar Rp.11.950.559.000,00 sehingga menjadi Rp.144.904.641.000,00
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bertambah Rp.14.940.570.000,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula Rp.445.470.829.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.25.769.956.267,00 atau 5,78% sehingga menjadi sebesar Rp.419.700.872.733,00 dengan rincian
 - ❖ Pendapatan Hibah sebesar Rp.1.566.904.000,00
 - ❖ Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.103.866.595.183,00
 - ❖ Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp.286.903.900.550,00

- ❖ Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.27.363.473.000,00

Total seluruh Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 adalah Rp.1.489.759.742.455,00 atau turun sebesar Rp.106.806.950.045,00 (6,69%) dari APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.596.566.692.500,00

BELANJA DAERAH

Pada sisi Belanja Daerah terdapat penurunan sebesar Rp.70.385.004.586,00 terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung mengalami penurunan sebesar Rp.109.145.733.664,00 dengan rincian :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp.103.248.838.164,00 karena adanya koreksi terhadap penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun Anggaran 2016 oleh Pemerintah Pusat
2. Belanja Hibah naik sebesar Rp.23.145.132.500,00
3. Belanja Bantuan Sosial naik sebesar Rp.860.000.000,00
4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp.29.671.403.000,00
5. Belanja Tak Terduga sebesar Rp.230.625.000,00

Belanja Langsung

Pada Belanja Langsung terdapat kenaikan sebesar Rp.38.760.729.078,00 yang merupakan program dan kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang.

Beberapa Program dan Kegiatan yang tertampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 antara lain :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

5. Pembangunan Jalan dan Jembatan
6. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan
9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan
10. Bantuan sosial Pemugaran RTLH bagi Keluarga Kurang Mampu

Total seluruh Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 adalah Rp.1.866.831.560.524,00 atau turun sebesar Rp.70.385.004.586,00 atau (3,63%) dari APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.937.216.565.110,00

PEMBIAYAAN DAERAH

Pada Penerimaan Pembiayaan Daerah terdapat kenaikan sebesar Rp.36.421.945.459,00, yang semula Rp.352.974.872.610,00 menjadi Rp.389.396.818.069,00 karena adanya penyesuaian SiLPA.

Pada Pengeluaran Pembiayaan Daerah tetap tidak mengalami perubahan sebagaimana dalam APBD TA 2016.

Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya saya sampaikan Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

PENDAPATAN DAERAH

Rp. 1.489.759.742.455

Pendapatan Asli Daerah

Rp. 216.963.928.144

Hasil Pajak Daerah

Rp. 41.678.500.000

Hasil Retribusi Daerah

Rp. 20.743.370.500

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Rp. 6.564.456.000

Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Rp. 147.977.601.644

Dana Perimbangan

Rp. 853.094.941.578

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Rp. 21.449.240.000

Dana Alokasi Umum

Rp. 671.800.490.578

Dana Alokasi Khusus Fisik

Rp. 144.904.641.000

Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Rp. 14.940.570.000

Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 419.700.872.733
Hibah	Rp. 1.566.904.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 103.866.595.183
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 286.903.900.550
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 27.363.473.000

Jumlah Pendapatan Rp. 1.489.759.742.455

BELANJA DAERAH Rp. 1.866.831.560.524

Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.042.068.589.336
Belanja Pegawai	Rp. 705.705.762.836
Belanja Bunga	Rp. 37.000.000
Belanja Hibah	Rp. 31.383.060.500
Belanja Bantuan Sosial	Rp. 7.330.000.000
Belanja Bagi Hasil Propinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik	Rp. 6.455.961.000
Belanja Bantuan Keuangan Kepada - Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan - Desa	Rp. 290.387.430.000
Belanja Tidak Terduga	Rp. 769.375.000

Belanja Langsung	Rp. 824.762.971.188
Belanja Pegawai	Rp. 152.074.644.150
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 245.731.013.335
Belanja Modal	Rp. 426.957.313.703

Jumlah Belanja Rp. 1.866.831.560.524

Surplus / (Defisit) Rp. (377.071.818.069)

PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	Rp. 389.396.818.069
--	---------------------

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 389.396.818.069

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Penyertaan Modal	Rp. 12.270.000.000
Pembayaran Pokok Utang yang jatuh tempo	Rp. 55.000.000

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 12.325.000.000

Pembiayaan Netto Rp. 377.071.818.069

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.

Rapat Dewan dan Hadirin yang Saya Hormati,

Demikian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, untuk segera dibahas melalui mekanisme pembahasan di DPRD dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Akhirnya tidak lupa saya menyampaikan terimakasih dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk Nya kepada kita sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 20 September 2016

**BUPATI REMBANG**

H. ABDUL HAFIDZ



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (II)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RAPERDA PERUBAHAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2016**

Hari : SELASA
Tanggal : 20 September 2016
Waktu : 13.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT:**

1. Pembukaan;
2. Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi DPRD tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;
3. Skors;
4. Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.
5. Penutup.

IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : H. GUNASIH, S.E.
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Demokrat	: 5 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	: 35 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Demokrat	: 3 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	: 10 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, S.E.

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat	Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang saya hormati	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang, dan
Yang saya hormati	Pimpinan Partai Politik, LSM, wartawan dan semua undangan yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Sebelum melangkah pada acara pokok, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala anugerah yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti Rapat Paripurna Kedua DPRD membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Ketentuan kuorum yang berlaku dalam rapat paripurna kedua ini adalah sama dengan ketentuan yang berlaku pada rapat paripurna pertama, yaitu rapat paripurna untuk menetapkan peraturan daerah dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD .

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 35 orang. Dengan demikian kuorum dalam rapat paripurna telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucapkan **“Bismillahirrohmanirrohim”** tepat pukul 14.25 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Perlu kami sampaikan, bahwa dalam rapat paripurna kedua ini, terdapat dua agenda pokok yang harus dilaksanakan yaitu Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, dan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Dan untuk lebih jelasnya akan saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan.
2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.
3. Skors.
4. Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.
5. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Kepada Saudara-saudara anggota Fraksi yang ditunjuk untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya, saya persilahkan menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Muhammad Anshori
2. Fraksi Partai Demokrat : Sdr. Eka Siswa Kartika
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Ilyas
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Sdr. Ali Ircham, S.T.
5. Fraksi Partai Gerindra : Sdri. Ayu Ardiyah Mayasari
6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr. H. Joko Suprihadi, S.H.
7. Fraksi Harapan : Sdr. Sukarmain

Selanjutnya dimulai dari Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sampai dengan Fraksi Harapan, secara berurutan saya persilahkan untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.

===== **PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI** =====

➤ (*Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 terlampir*)

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampiannya.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Acara selanjutnya adalah Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

➤ Pimpinan Rapat (H. Gunasih, S.E.)

“ Ini saya tawarkan terlebih dahulu kepada semua anggota DPRD yang hadir apa perlu saya skors atau kita langsung lanjut , karena Saudara Bupati sudah siap dengan jawaban atas pemandangan fraksi- fraksi tadi. Setuju lanjut?????.....

=====SETUJU=====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita masuki acara yang keempat, yaitu penyampaian jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Selanjutnya, kepada Saudara Bupati dipersilahkan.

===JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI===

➤ *(Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 terlampir)*

Terima kasih Saudara Bupati atas penyampaian jawabannya.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Agenda – agenda pokok dalam rapat paripurna kedua hari ini telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat paripurna kedua ini. Untuk Rapat Paripurna Ketiga membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 akan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2016 jam 13.00 WIB. Akhirnya, dengan mengucap “Alhamdulillahirobbil ‘alamin“ tepat pukul 15.45 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat paripurna ini.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA,



H. GUNASIH, S.E.

SEKRETARIS,



Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap
Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran
2016.
- LAMPIRAN III : Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum
Fraksi- Fraksi terhadap Raperda Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2016.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD TH 2016

HARI/TANGGAL : SELASA , 20 SEPTEMBER 2016
 PUKUL : 13.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, S.T	Anggota		
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota		
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD		
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H	Anggota		
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H	Anggota		
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota		
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota		
17	H. HARNO, S.E	Anggota		
18	MUGIYARTO, S.T	Anggota		
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD		
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota		
21	ILYAS	Anggota		
22	SHOLEH, B.A	Anggota		
23	WASIMAN	Anggota		
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota		

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, S.P, M.H	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, MSi	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, S.H	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd	Anggota	44	
45	NUR, JANNAH	Anggota	45	

Keterangan :

1 I : Ijin

2 S : Sakit

3 C : Cuti

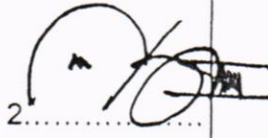
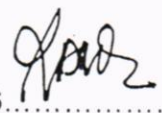
4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG
WAKIL KETUA,

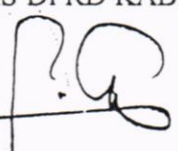
H. GUNASIH, S.E

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA PERUBAHAN APBD TH 2016

HARI : SELASA , 20 SEPTEMBER 2016
PUKUL : 13.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO,S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3		Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4		Pengadilan Negeri Rembang	4.
5		Dandim 0720 Rembang	5.
6	M. IMRON ROSADI	Kepolisian Resort Rembang	6. 
7		Pengadilan Agama Kab. Rembang.	7.
8	Ir. HARI SUSANTO,M.Si	Pj Sekertaris Daerah	8. 

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG


Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA PERUBAHAN APBD TH 2016

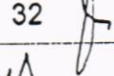
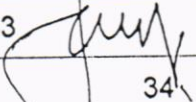
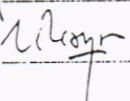
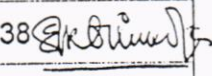
HARI : SELASA , 20 SEPTEMBER 2016

PUKUL : 13.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG		1
2	CAMAT KALIORI		2
3	CAMAT SUMBER		3
4	CAMAT SULANG		4
5	CAMAT BULU		5
6	CAMAT PAMOTAN		6
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE		8
9	CAMAT LASEM	<i>Kecamatan</i>	9
10	CAMAT PANCUR		10
11	CAMAT SEDAN	<i>Iswanto</i>	11
12	CAMAT SLUKE		12
13	CAMAT KRAGAN		13
14	CAMAT SARANG		14

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

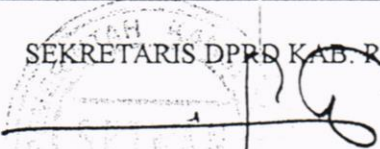
[Signature]
Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
31	DINAS DUKCAPIL	Sutartik		31 
32	DINSOSNAKERTRANS	Prpto. R	Dit. Rembang	32 
33	DINBUDPARPORA	S O Y O N O	P27 Rembang	33 
34	DINAS ENERGI & SDM			34 
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Puswandi S	Ka	35 
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO	Ka	36 
37	KANTOR PERPUST & ARSIP			37
38	KANTOR KPPT	Ety Purbiyanti	Ka. Sub. Reg. TV	38 
39	RSUD dr. R. SUTRASNO			39
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41
42	P D A M			42
43	PÉRCETAKAN DAERAH			43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			50
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG			52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60
61	B P N - KAB. REMBANG			61
62	KANTOR PAJAK			62
63	UP3AD (ASET DAERAH)			63
64	KANTOR PELABUHAN			64

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG			65
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN			71
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG			74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA			85
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM			87
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT			92
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95				95

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105
106				106
107				107
108				108
109				109
110				110
111				111
112				112
113				113
114				114
115				115
116				116
117				117
118				118
119				119
120				120
121				121
122				122
123				123
124				124
125				125

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG


Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

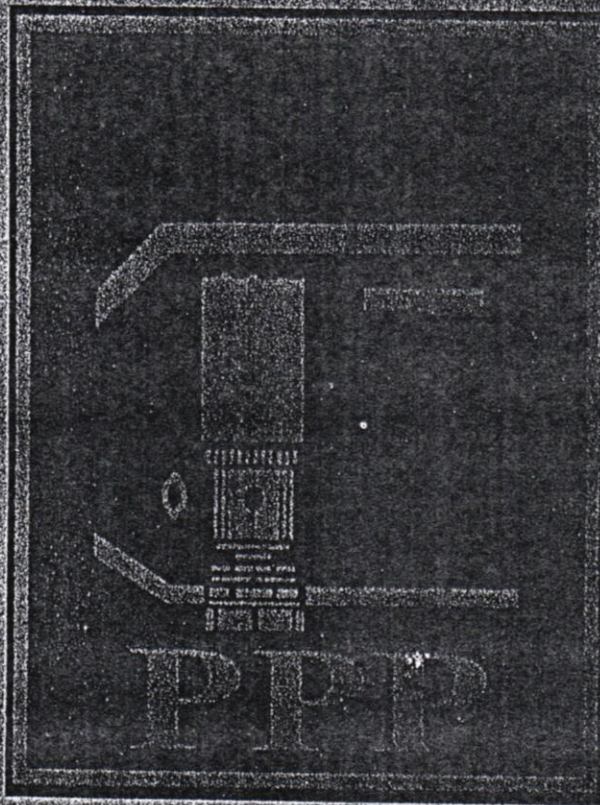
PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

**RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2016**



**DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Hari : SELASA, 20 SEPTEMBER 2016
Dibacakan Oleh : MOHAMMAD ANSHORI, SH.**

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

UL. Djiponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212 Rembang



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2016

Selasa , 20 September 2016

Dibacakan oleh : MOHAMMAD ANSHORI, SH.

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat siang , dan Salam sejahtera bagi kita semua

Bismillah., Alhamdulillah., Assholatu Wassalamu a'la Rosulilla., Wa'alaa alihi wasohbihi wamawwalah., laahaula wala quwwata illabillah..., Amma ba'da.....

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.

=> sdr. Pj. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang.

=> Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf . Dan..

=> Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, serta semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pemandangan Umum ini, terlebih dahulu marilah kita, tak henti-hentinya selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir dalam Rapat Paripurna ini , dalam keadaan sehat Wal aflat tidak kekurangan suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita MUHAMMAD SAW, para shahabat, beserta seluruh keluarganya.

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian Pemandangan umum kami , terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang tahun 2016, yang paparan dan penjelasannya telah disampaikan oleh sdr. Bupati, dalam rapat paripurna, beberapa puluh menit yang lalu , pada hari Selasa ini juga , tanggal 20 September 2016, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang , terutama kepada TAPD , yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD tahun 2016 ini , dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan , sehingga dapat segera untuk dilakukan pembahasan.

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang mendalam, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2016 ini, kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, dalam Pemandangan Umum ini, menyampaikan beberapa catatan sebagai usulan dan masukan, untuk dijadikan bahan pertimbangan, didalam pelaksanaan pembahasan , antara lain :

1. APBD induk Pemerintah Kabupaten rembang tahun 2016, sebesar 1.937.216.565.110 dan pada KUA Persetujuan Perubahan sebesar : 1.866.928.440.524,- Pada Raperda Perubahan APBD Tahun 2016 sebesar : 1.866.831.560.524,- , selisih penurunan APBD ini, adalah sebagai akibat dari adanya Peraturan Menteri Keuangan, nomor 125/PMK.07/2016 . Sampai saat ini komulatif Progress penyerapan APBD 2016 sedang mencapai : 57,82 % terhadap APBD Induk 2016 , dan bila terhadap R APBD^P 2016 , capaiannya kurang lebih sebesar : 60,00 % . Dalam hal ini , agar penyerapan APBD Perubahan tahun 2016 , bisa maksimal dan dengan harapan tidak terjadi Silpa yang tinggi , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, minta dengan sangat agar Jajaran Pemkab Rembang betul-betul bekerja extra keras, agar apa yang menjadi program Pemkab Rembang dan harapan masyarakat benar-benar terwujud.
2. Berkaitan dengan Bantuan Keuangan desa dan Hibah / Bansos , yang Perbupnya telah diterbitkan , kami dari fraksi partai persatuan pembangunan mendukung penuh kepada sdr. Bupati untuk menekan kepada SKPD terkait agar melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam perubahan APBD 2016 ini, terutama untuk hibah di Dispendik untuk segera diverifikasi . Terkait dengan dana Hibah untuk Pendidikan Usia Dini dari Pemerintah Pusat, kami meminta untuk segera dilaksanakan, seperti daerah yang lain.

Singkatnya tidak ada alasan lagi bagi SKPD untuk tidak melaksanakan kegiatan tersebut.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2016 ini , dan selanjutnya segera untuk dilakukan pembahasan. Semoga kita selalu diberikan petunjuk , kemudahan, dan kelancaran, sehingga apa yang kita kerjakan mendapatkan hasil yang maksimal, dan manfaat , untuk Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang tercinta.

Trima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

Billahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 20 September 2016

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA



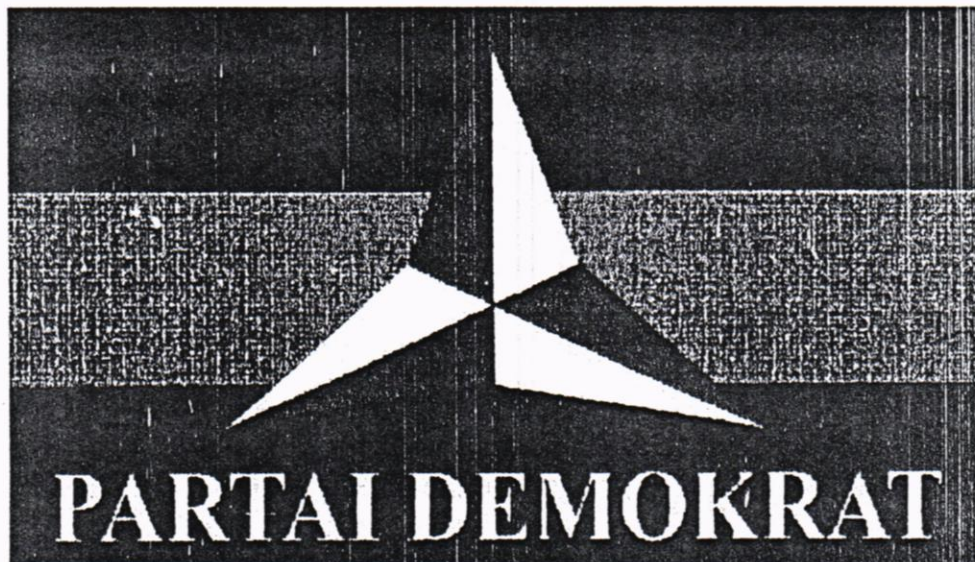
SUGIHARTO

SEKRETARIS



ZAIMUL UMAM NS

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP
RAPERDA PERUBAHAN APBD
TAHUN 2016**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Rembang, 20 September 2016
Dibacakan oleh : EKA SISWA KARTIKA**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194; 693290; 693291

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP
RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2016**

SELASA, 20 SEPTEMBER 2016

Dibacakan oleh : EKA SISWA KARTIKA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat Siang dan Salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
4. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
5. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama Staff
6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya, kita semua diberi kesehatan, kenikmatan lahir dan batin sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna ini dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2016

Mengawali pandangan umum ini, kami mengajak pada para hadirin semua untuk mendo'akan kepada para jamaah haji asal Kabupaten Rembang yang sebentar lagi pulang ketanah air, semoga diberikan kesehatan, keselamatan sampai ke Rembang dan menjadi haji yang mabrur.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Berkaitan dengan RAPERDA Perubahan APBD Kabupaten Rembang tahun 2016 ini, Kami Fraksi Demokrat berharap kerja keras dan kesungguhan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam bekerja untuk memacu pembangunan yang tertinggal ditahun-tahun sebelumnya, mengingat waktu pelaksanaan yang pendek kami berharap Pemerintah Kabupaten Rembang memaksimalkan pekerjaan ini dan kami berharap kehati-hatian dalam bekerja ditingkatkan tetapi bukan harus takut dalam menjalankan tugas-tugasnya sehingga pembanguna di Kabupaten Rembang berjalan sesuai denghan harapan kita semua.

Dengan penyampaian pandangan umum ini Kami Fraksi Demokrat kembali memberikan beberapa saran, pendapat dan masukan demi kebaikan Kabupaten Rembang yang kita cintai ini, antara lain :

1. Kami mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang bahwa diwaktu rapat konsultasi Bupati dan Pimpinan gabungan DPRD di ruang banggar pada akhir tahun 2015 disaat menjelang KUAPPA induk 2016 bahwa akan menaikkan upah Tenaga Harian Lepas (THL) dilingkungan Kabupaten Rembang pada tahun 2016 sesuai dengan UMK Kabupaten Rembang. yang saat itu upah THL hanya Rp 400.000 perbulan (di Dinas PU Kabupaten Rembang), tetapi realita yang ada saat ini (anggaran induk 2016) pada Dinas PU upah THL masih tetap saja Rp 400.000 perbulan. Oleh karena itu

mohon kepada Bupati supaya memerintahkan para Kepala SKPD agar menyesuaikan pembayaran upah THL sesuai dengan UMK kabupaten rembang, ini sama saja dengan Pemerintah Kabupaten Rembang melanggar aturan yang dibuatnya sendiri.

2. Mohon ditahun anggaran 2017 untuk RTH (ruang terbuka hijau) dikota Lasem untuk direalisasikan.
3. Kami juga berharap supaya untuk meningkatkan/menjalankan infrastruktur di Kabupaten Rembang dan meningkatkan ekonomi terutama dibidang kelautan, bidang pertanian dan bidang perindustrian.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Demikianlah pandangan umum Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

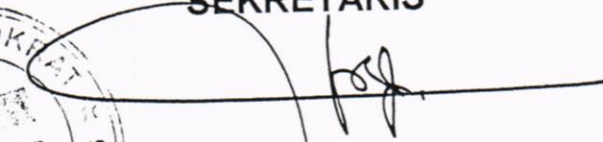
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 20 September 2016

FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA

SEKRETARIS



EKA SISWA KARTIKA **IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.**



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAB BELANJA DAERAH KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2016**

disampaikan oleh : Ilyas

pada sidang paripurna DPRD kabupaten Rembang, selasa 20 september 2016

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Yang kami Hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Pj. Sekretaris Daerah dan calon Sekretaris Daerah serta Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami Hormati, kawan-kawan pers, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang berbahagia.

Segala puji bagi Allah SWT , berkat nikmatNya pada hari ini kita dapat bertemu bertatap muka menghadiri sidang paripura tentang Raperda APBD perubahan 2016 Kabupaten Rembang kali ini dalam keadaan sehat wal afiat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Raperda Perubahan APBD .2016, Demikian pula kepada saudara Bupati diucapkan banyak terima kasih atas disampaikannya Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun ada kekecewaan di hati kami, pada saat Bupati membacakan pengantar nota keuangan tersebut pada sidang paripurna DPRD, banyak sekali SKPD dan camat yang tidak hadir. Kami minta agar Bupati memberikan teguran kepada camat dan pimpinan SKPD yang mendapatkan undangan namun tidak menghadirinya. Apalagi dalam sidang paripurna terkait APBD perubahan 2016. Marilah kita jadikan rapat paripurna DPRD yang terhormat ini sebagai ajang silaturahmi yang mampu menyelesaikan misinformasi/ komunikasi antara legislative dan eksekutif.

Pimpinan sidang dan Hadirin yang berbahagia

Seminggu yang lalu ada dua kegiatan keagamaan yang dilakukan di kabupaten Rembang, yang pertama kirab budaya untuk memperingati 161 tahun klenteng dan ledul Adha atau hari raya besar bagi Ummat Islam. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengapresiasi masyarakat Rembang yang mampu hidup rukun berdampingan meski berbeda keyakinan. Kami juga sampaikan penghargaan kepada aparat keamanan yang telah bekerja keras hingga dua kegiatan keagamaan tersebut kondusif.

Bagi ummat Islam Berkurban adalah indikator keimanan kepada Allah SWT, merupakan manifestasi berketuhanan hanya kepada Allah SWT, merupakan cermin kepasrahan secara total kepada-Nya dengan melaksanakan perintah Nya.

Bagi orang yang memiliki kelonggaran tetapi tidak mau berkorban, ia berdosa atau tidak terpuji. Lebih memilih mencintai hartanya daripada mencintai yang Maha Memberi Harta (Tuhan), lebih memilih mendewakan hartanya daripada melaksanakan perintah Tuhannya, lebih takut kehilangan hartanya daripada kehilangan kasih sayang Tuhannya.

Bagi saudara-saudara yang ada kelonggaran, tetapi belum menyembelih hewan kurban, bersegeralah dalam iedul adha yang akan datang membeli kambing domba atau sapi untuk berkorban. Jangan sampai kelonggaran yang dimiliki berganti dengan kesempitan, jangan sampai harta tersebut tak berharga lagi dan tidak ada manfaatnya lagi.

Mengutamakan segala sesuatu dan memusatkan perhatian terhadap "sesuatu" yang teramat dicintai (selain Allah) hanya akan "mepertuhankan" sesuatu membuat manusia lupa akan qodratnya. Seperti "mepertuhankan" harta benda, uang, jabatan, mobil, nama besar, predikat pangkat atau kedudukan, membanggakan anak atau orang tua, ketenaran isteri atau suami, akan menggoyahkan iman dan dapat pula merusak tatanan kehidupan.

Hal seperti di atas dapat digambarkan; bagaimana dampaknya bila seorang pemimpin lebih mendahulukan kepentingan keluarganya daripada kepentingan umum atau kepentingan rakyat yang dipimpinnya? Bagaimana jadinya bila seseorang hanya menjadikan materi sebagai yang dipertuhankannya?

Sidang Dewan Yang Kami Mulyakan

Bila seseorang berprinsip atau bertuhan kepada selain Allah, seperti berprinsip pada kemewahan, materi, jabatan, predikat, dan gaya hidup, sementara Allah hanya dijadikan sebagai alat dukung belaka, maka kerusakan pribadi lambat laun akan terjadi, dan ini pasti!.

Akibatnya menjadi takut kehilangan, rasa kurang terus-menerus menderanya, tidak puas atas harta yang diraihnya, muncul kecemasan yang berlebihan, takut menghadapi pensiun, khawatir dipindah tugaskan ke tempat yang tidak sesuai dengan nafsunya atau turun jabatan dan sebagainya. Dan yang paling dikhawatirkan adalah mau menghalalkan segala cara untuk mempertahankan prinsip hidupnya, rela melakukan tindakan tindakan

Semangat berkorban inilah yang seharusnya menjadi pijakan kita dalam melakukan efisiensi penundaan DAU sebagaimana PMK 125. Efisiensi atas penundaan 113,6 miliar dilakukan terhadap kegiatan kegiatan yang bukan menjadi prioritas, seperti makan minum, belanja operasi dan ATK.

Raperda Perubahan APBD 2016 tentunya akan berfokus pada hal hal seperti ini.

Pimpinan Sidang dan Hadirin Yang Kami Mulyakan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung peran Pemkab Rembang dalam menjalankan fungsinya untuk menunjang pelayanan publik, implementasi regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat.

APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan Pemkab, muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya dalam penyusunan dan pembahasannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan tepat sasaran. APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat.

Perkenankan FPKB menyampaikan pandangan, saran dan pertanyaan sebagai berikut:

A. PENDAPATAN

1. Terhadap rencana kenaikan PAD baik dari pos pajak, retribusi, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dari Pendapatan BLUD FPKB memberikan apresiasi yang tinggi, hal ini menunjukkan kinerja SKPD penghasil PAD semakin baik. FPKB meyakini sesungguhnya bila dilakukan intensifikasi pendapatan, penekanan angka kebocoran di pos retribusi, dan sumber sumber PAD lainnya masih sangat mungkin mengalami kenaikan.
2. Kami Mohon Saudara Bupati menjelaskan kenaikan target PAD sebesar Rp. 39.517.244.644,00 yang menurut kami kenaikan target ini cukup fantastis. Bagaimana target ini bisa terealisasi dalam waktu yang cukup pendek?
3. Terhadap penundaan DAU sebagaimana PMK 125 sebaiknya ditetapkan parameter dan indikator indikatornya sebelum dilakukan efisiensi agar APBD mencerminkan rasa berkeadilan.
4. Terkait dengan strategi pencapaian target PAD dari pajak dan retribusi daerah, fraksi PKB meminta diberikan rekap data terkini perolehan PAD dari kedua sektor tersebut.

B. BELANJA

Kami mohon agar Pemkab Rembang bijak untuk merumuskan efisiensi atas penundaan DAU sebesar 113,6 miliar. Memilah secara tepat belanja belanja yang harus ditunda.

Terhadap Belanja, kami juga memohon agar pelaksanaan kegiatan yang waktunya tidak memenuhi ketentuan bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan untuk skema penundaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pada pos belanja tidak langsung dijelaskan bahwa ada penurunan dikarenakan adanya koreksi terhadap penyaluran dana tunjangan profesi guru PNSD. Menurut kami penurunan tersebut masih tidak menunjukkan efisiensi belanja pegawai karena setiap ada kegiatan dan belanja modal juga disertai dengan Honor.

C. PEMBIAYAAN

Pada postur penerimaan pembiayaan daerah terdapat kenaikan dari angka Rp. 352.974.872.610,00 ditambah Rp. 36.421.945.459,00 menjadi Rp. 389.396.818.069,00. Mohon Pemkab Rembang agar cermat dalam menghitung angka tersebut, sebab angka SiLPA tersebut kami anggap masih berpotensi naik dikarenakan banyaknya kegiatan Th. 2015 yang tidak terlaksana.

Sidang dewan Yang Kami Mulyakan

Demikian pemandangan umum ini kami sampaikan dan atas perhatian semua pihak kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rembang, 20 September 2016

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Muhammad Imron

Ketua

Iyas

Sekretaris





**FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Kode pos 59212 Rbg.

PEMAMANDAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Tanggal : SEPTEMBER 2016

TENTANG : RAPERDA PERUBAHAN APBD 2016

Dibacakan Oleh :

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kab. Rembang

Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) Kab. Rembang

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab. Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang

Para Tamu Undangan yang Berbahagia.

Yang Terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang beserta jajaran dan staf,

Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang hadir
pada sidang hari ini yang kami hormati

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI MULYAKAN,

Alhamdulillah puji sukur kami panjatkan kepada ALLAh SWT yang telah memberikan limpahan rahmat NYA sehingga kita bisa menghadiri sidang Paripurna pada siang ini tanpa halangan dengan agenda pembacaan Pemandangan Umum Fraksi terkait Raperda APBD Perubahan tahun 2016. Sholawat dan Salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW . Pada kesempatan yang berbahagia ini ijinilah kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan Raperda APBD perubahan tahun 2016 yang tercantum dalam Pemandangan Umum Fraksi kami , diantaranya :

1. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem berharap agar semua system penganggaran ini mengacu pada RPJMD yang telah tersusun dan disahkan sebagai acuan bagi kita dalam mengambil kebijakan anggaran .Sehingga program dan kegiatan prioritas yang akan disusun dapat mencapai target.
2. Untuk memenuhi target kuota JKN KIS Kab. Rembang kami dari fraksi PDI Perjuangan Nasdem berharap ada penambahan dana agar seluruh masyarakat miskin bisa terakomodir.
3. Karena terkait kebutuhan kesejahteraan sosial masyarakat , Kami berharap Pemkab Rembang segera merealisasikan jaminan sosial dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan kepada petani dan nelayan.
4. Untuk memenuhi target rencana yang tertuang dalam RPJMD 2016 – 2021 kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem mendorong agar Pemkab Rembang mempunyai program terobosan / inovatif yang berbasis teknologi untuk mengikuti perkembangan jaman serba canggih, yang tentunya untuk penganggarnya dapat dimulai pada anggaran perubahan ini. Sebagai contoh proses pengurusan perijinan kapal nelayan yang terintegrasi dan online.

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI MULYAKAN,

Dalam upaya mempercepat pembangunan di Kab. Rembang ini perlu kerjasama antar lini yang sangat baik antar semua pihak baik Pemkab Rembang , DPRD , dan masyarakat. Oleh karena itu marilah kita tingkatkan sinergi ataupun kerjasama semua elemen yang ada untuk mempercepat terwujudnya pembangunan di Kabupaten Rembang ini.

Demikianlah Pemandangan Umum ini kami sampaikan untuk menjadi pertimbangan dalam menyusun Raperda APBD Perubahan tahun 2016 ini, semoga memberikan manfaat .

Wassalamu alaikum Wr, Wb.

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT



KETUA


JASMANI

SEKRETARIS


ALI IRCHAM ST

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

ATAS

RAPERDA PERUBAHAN (APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016



REMBANG, 20 SEPTEMBER 2016

Pemandangan Umum
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA PERUBAHAN (APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016

Disampaikan oleh **AYU ARDIYAH MAYASARI**
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Selasa 20 September 2016

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Sdr. Plt. Bupati Rembang

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Rembang;

Yang kami hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI

Yang kami hormati Sdr. Para Pejabat dilingkuangan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Sdr. Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali kalimat pembuka, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Ke 2 dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Rembang Tahun 2016 dengan baik dan lancar, semoga

apa yang telah kita kerjakan ini menjadikan amal dan ibadah yang bermanfaat.

Selanjutnya sholawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rosullullah Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi umat manusia, dan semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Sehubungan dengan akan dibahasnya Raperda APBD Perubahan Kabupaten Rembang Tahun 2016 Fraksi Gerindra akan memberikan beberapa catatan-catatan kritis sebagai berikut :

1. Bahwa minimnya penyerapan Anggaran secara umum dalam APBD induk 2016 ,mengharuskan kita semua untuk merubah paradigma berpikir kita bahwa Anggaran untuk Pembiayaan pembangunan diKabupaten Rembang adalah hanya semata – mata untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Rembang dan bukan untuk kepentingan golongan tertentu, untuk itu kami Fraksi Gerindra mengajak semua komponen Penyelenggara Aparatur Pemerintah untuk berkomitmen secara tulus dan betul –betul akan melaksanakan kegiatan –kegiatan yang nantinya akan tertuang dalam Dokumen PERDA APBD Perubahan Tahun 2016.

2. Bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang selaku pemegang saham mayoritas di PT. RBSJ untuk kesekian kalinya kami memberikan dorongan kepada Saudara Bupati Selaku pemegang saham Mayoritas PT.RBSJ untuk tidak ragu – ragu segera melakukan pergantian dan perombakan terhadap management PT.RBSJ yang sudah jelas – jelas tidak mampu meningkatkan kinerjanya terbukti hingga detik ini dan saat ini PT.RBSJ tidak mampu memberikan kontribusi secara Ekonomi kepada Pemkab Rembang yaitu tidak mampu memberikan DEVIDEN kepada Pemkab Rembang sesuai Amanat yang diberikan oleh rakyat Rembang melalui tangan Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Sebagaimana kita pahami, bahwa Kabupaten Rembang saat sekarang sudah menjadi ikon seksi di Jawa Tengah. Hal ini dapat kita rasakan, ternyata konsep pengembangan investasi banyak dilakukan di Jawa Tengah utamanya Kabupaten Rembang. Pendirian pabrik semen di daerah Rembang selatan, pendirian PLTU di daerah Rembang Timur. Pastinya secara operasional kita membutuhkan sarana memadai untuk memediasi keadaan-keadaan genting ini, selama perusahaan-perusahaan besar itu sudah beroperasi. Namun pastinya, satu hal yang tidak boleh kita abaikan. Apapun yang kita rencanakan harus ada kontribusi dalam rangka menaikkan Pendapatan Asli Daerah dengan maksud utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga Rembang.

Bertolak dari keadaan krusial ini. Kami dari Fraksi Gerindra berharap kepada pihak eksekutif sebagaimana konsep otonomi daerah, yakni ikut memfasilitasi terbitnya perijinan , terbangunnya infrastruktur yang memadai dalam rangka membangun pelabuhan berkapasitas nasional di Kabupaten Rembang.

Adapun wujud keseriusan yang kami harapkan dari pihak eksekutif yaitu; (1) dalam pelaksanaan Pembangunan dan pengurusan proses perijinan Pelabuhan harus merunut sesuai aturan yang berlaku. (2) realisasi dari pembangunan pelabuhan berskala nasional di Kabupaten Rembang agar dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku, Sehingga tidak menimbulkan permasalahan dan konflik dikemudian hari baik antar Investor dengan Pemkab Kabupaten Rembang ataupun antar Investor itu sendiri, pemkab rembang harus berani bertidak tegas terhadap Investor – Investor Pelabuhan yang tidak taat Regulasi dan seenaknya saja mendirikan bangunan diatas tanah Pelabuhan yang secara **DeFacto** dan **Deyure** adalah milik negara.

4. Bahwa dengan akan segera berakhirnya tahun 2016 kami Fraksi Gerindra berharap agar Pemkab Rembang segera melaksanakan Pesta Demokrasi Pilkades sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Undang -Undang , agar pelayanan masyarakat ditingkat paling bawah

yaitu tingkat Desa tidak mengalami permasalahan dan hambatan dengan sudah terpilihnya kepala Desa definitif.

5. Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pada tahun berjalan (SILPA) dan untuk pembiayaan di Anggaran perubahan tahun 2016 merupakan sumber penerimaan internal Pemda yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Bentuk penggunaan SILPA ada dua, yakni: *Pertama*; untuk melanjutkan kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya (luncuran) dan *Kedua*; membiayai kegiatan baru yang tidak teranggarkan dalam APBD murni.

Hal menarik yang sering terabaikan sesungguhnya tujuan utama dari realisasi APBD yakni: (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (2) meningkatkan pelayanan masyarakat, (3) mempercepat pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, dan (4) mempercepat pengelolaan potensi daerah.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan pandangan kami sebagaimana tersebut. Dari Fraksi Gerindra, intinya meminta pihak Eksekutif agar benar-benar serius dalam merencanakan dan melaksanakan Peraturan Daerah APBD Perubahan mendatang. Kemudian pihak eksekutif juga harus senantiasa membiasakan bersikap konsisten terhadap apa yang sudah direncanakan. Melihat besarnya Anggaran murni 2016 yang hanya sedikit terserap khususnya Anggaran bantuan keuangan desa,

sekali lagi Fraksi Gerindra mengajak semua pihak untuk berkomitmen melaksanakan APBD perubahan 2016 yang sebentar lagi akan dilakukan pembahasan ditingkat komisi dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi PERDA APBD perubahan 2016.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan. Teriring doa dan semangat kerakyatan semoga Raperda ini bisa dibahas dengan penuh tanggung jawab, cermat, hikmat, dan tepat. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun niat baik ini. Serta membuahkan hasil yang optimal, berguna, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 20 September 2016

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG



HERI KURNIAWAN, SE.

Ketua



PUJI SANTOSO, SP. MH.

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PEMANDANGAN UMUM FRAKSI KARYA SEJAHTERA DPRD KABUPATEN REMBANG

terhadap
RAPERDA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TA. 2016

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Rembang
Hari Selasa, 20 September 2016

Assalamu'alaikum wa rohmatullohi wa barokatuh.

Yang kami hormati

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- Saudara Pimpinan dan semua Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Saudara Penjabat Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di kalangan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Para hadirin yang kami muliakan.

Segala puji bagi Allah yang melimpahkan taufik rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk, bimbingan dan keselamatan kepada kita semua dalam mengemban amanah selaku abdi masyarakat dan abdi negara.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat

Menanggapi Pengantar Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2016 yang disampaikan oleh Sdr. Bupati tadi, ada beberapa hal yang kami mintakan penjelasan dan harapan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang sbb.:

1. Dengan ditundanya DAU dari pemerintah pusat, Fraksi Karya Sejahtera berharap agar Pemerintah Kabupaten Rembang tidak memaksakan belanja pembangunan yang kurang

prioritas, disisi lain menggenjot pendapatan daerah. Diantaranya dari Rp. 180.807.678.500,- (seratus delapan puluh milyar delapan ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan lima ratus rupiah) menjadi Rp. 216.063.028.144.- (dua ratus enam belas milyar enam puluh tiga juta dua puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah) Sementara kita melihat potensi bertambahnya pendapatan daerah tidak memungkinkan. Contoh, munculnya PP Nomer 34 tahun 2016 menyebutkan bahwa BPHTB yang semula dipungut sebesar 5 % dari NJOP turun menjadi 2,5 % dari NJOP. Mohon penjelasan argumentasi peningkatan PAD ini !

2. Dalam hal peningkatan pendapatan lain-lain yang sah dalam RAPBD Perubahan 2016 sejumlah Rp. 147.977.601.644,- (seratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) naik sebesar Rp. 39,5 milyar dari APBD Induk TA 2016 sejumlah Rp. 106.460.357.000,- (seratus enam milyar empat ratus enam puluh milyar rupiah tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupai), kami membandingkan dengan realisasi lain-lain PAD yang sah pada TA 2015 yang hanya sebesar Rp. 114 milyar. Apa alasan Sdr. Bupati meningkatkan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah pada Perubahan APBD 2016 ini ?

3. Berbicara tentang SILPA, Fraksi Karya Sejahtera melihat adanya inkonsistensi antara LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Rembang TA 2015 dengan RAPBD Perubahan TA 2016. Dalam LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemkab

Rembang TA 2015 tertulis SILPA sebesar Rp 396.607.873.805,- (tiga ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah) sementara dalam RAPBD Perubahan TA- 2016 tertulis Rp. 389.396.816.969,- (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah). Mohon dijelaskan !

4. Dengan terbitnya Permenkeu Nomer 125 Tahun 2016 ini Fraksi Karya Sejahtera ingin bertanya, sudahkah Saudara Bupati meminta kepada Pemerintah Pusat untuk menjelaskan secara rinci apa alasan mencabut atau menunda DAU khususnya kepada Kabupaten Rembang ?
5. Dengan terbitnya Permenkeu Nomer 125 Tahun 2016 ini Fraksi Karya Sejahtera bertanya, sudahkah Saudara Bupati meminta kepada Pemerintah Pusat adanya jaminan yang diberikan atas terbayarnya DAU yang tertunda tersebut pada pada tahun anggaran yang akan datang ?
6. Fraksi Karya Sejahtera minta kepada Saudara Bupati agar menjelaskan program, kegiatan atau tindakan yang dilakukan atas dampak penundaan DAU tsb.
7. Penundaan DAU ini memberi pelajaran kepada Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mencari terobosan pembiayaan pembangunan diluar pembiayaan APBD antara lain dengan bekerjasama dengan pihak swasta, atau memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perusahaan yang bekerja di Kabupaten Rembang. Misalnya pengembangan pariwisata atau peningkatan kesejahteraan sosial dsb.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Menutup pemandangan umum ini kami mengutip piweling Jawa sbb: “Nêgârâ bisa têntrem lamún murah sandhang kalawan pangan, pârâ kawulâ pâdhâ seneng nyambút karya, penguwâsane darbé sipat bèrbudi bâwâ leksana”. Artinya, negara akan tenteram kalau murah sandhang pangan, rakyatnya gemar bekerja dan penguasanya yang mempunyai sifat adil dan berjiwa mulia.

Bila ada kata-kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Karya Sejahtera kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang.

Rahayu ingkang samya pinanggih - Wassalamu'alaikum wa rohmatullohi wa barokatuh.

DPRD KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,

Sekretaris,



H. ISMARI

JOKO SUPRIHADI, SH

FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PEMANDANGAN UMUM
TERHADAP
RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2016

Dibacakan Oleh : SUKARMAIN

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala
Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten
Rembang.

Camat se Kabupaten Rembang

Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab.
Rembang dan hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun 2016 dalam keadaan sehat.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan ini, kami hanya mencermati tentang kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Pengantar Nota Keuangan disampaikan bahwa PAD mengalami kenaikan sebesar 20 % atau Rp. 36.156.249.644,00. Kami mengharapkan penjelasan lebih detil mengingat Tahun Anggaran 2016 hanya tersisa 3 bulan efektif. Tentunya bukan hal yang mudah untuk mengejar kenaikan PAD sebesar 20 % tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, harap disertakan pencapaian PAD per September 2016.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,
Demikianlah pemandangan umum dari Fraksi Harapan, semoga
pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun 2016 ini dapat
berjalan dengan baik dan tidak lepas dari petunjuk Allah SWT
Aamin.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 20 September 2016

FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG

Ketua


SUKARMAIN

Sekretaris

SAHNINGSIH, SE



JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG



TAHUN ANGGARAN 2016



**JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2016**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat :

- Saudara Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;
- Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Saudara Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali jawaban Saya atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita masih diberi nikmat, kesehatan dan kebahagiaan.

Berkenaan dengan pertanyaan, saran, pendapat dan catatan yang disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang, dapat saya jelaskan sebagai berikut :

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	I. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
1.	Agar penyerapan APBD Perubahan Tahun 2016 bisa maksimal dan tidak terjadi Silpa yang tinggi	1. Untuk mempercepat penyerapan APBD PemKab telah mengambil langkah-langkah diantaranya adalah melakukan rapat koordinasi setiap hari Senin dengan Kepala SKPD dan Pelaksana Teknis serta melakukan pendampingan dengan Tim TP4D.
2.	Pelaksanaan Hibah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Dinas Pendidikan untuk segera diverifikasi	2. Kami tindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ada dengan : 1. Membentuk Tim Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan dengan diterbitkannya SK Kepala Dinas Pendidikan Nomor 900/0346/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 tentang Tim Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Pendidikan. 2. Melaksanakan inventasiasi kelengkapan administrasi usulan tertulis pemohon hibah/bansos. 3. Usulan tertulis dari pemohon hibah/bansos yang tidak memenuhi syarat administrasi tidak direkomendasikan pada Perubahan APBD Tahun 2016. 4. Usulan tertulis dari pemohon hibah/bansos yang memenuhi syarat administrasi akan dilanjutkan dengan verifikasi lapangan dan apabila telah sesuai dapat direkomendasikan dalam Perubahan APBD Tahun 2016.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	<u>II. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT</u> 1. Honor Tenaga Harian Lepas (THL) belum sesuai UMK 2. Peningkatan infrastruktur dan perekonomian dibidang kelautan, pertanian dan perindustrian	1 Pemerintah Kabupaten Rembang akan melakukan kajian atas proses perekrutan dan pemberian upah terhadap Tenaga Harian Lepas (THL) yang di biyai dari APBD Kabupaten Rembang sesuai ketentuan yang berlaku 2 Saat ini pelaksanaan proyek infrastruktur sudah berjalan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

No	PERTANYAAN	JAWABAN																																													
	III. FRAKSI PKB																																														
1.	Rencana Kenaikan PAD (Lain-lain PAD yang Sah) sangat signifikan sebesar Rp.39.517.244.644,- mohon penjelasan.	1 Kenaikan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp.39.517.244.644,- dengan rincian : <table><tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Penerimaan jasa giro</td><td>4.735.000.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Penerimaan bunga deposito</td><td>3.250.000.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Tuntutan ganti rugi daerah</td><td>1.100.000.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan</td><td>120.000.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Pendapatan denda pajak</td><td>45.000.000</td></tr><tr><td>6</td><td>Pendapatan denda retribusi</td><td>3.633.460</td></tr><tr><td>7</td><td>Pendapatan dari pengembalian</td><td></td></tr><tr><td>-</td><td>TASPEN</td><td>20.000.000</td></tr><tr><td>-</td><td>PEMILUKADA</td><td>2.300.000.000</td></tr><tr><td>-</td><td>Setoran lainnya</td><td>230.577.000</td></tr><tr><td>8</td><td>Fasilitas Sosial dan Fasum</td><td>60.000.000</td></tr><tr><td>9</td><td>Penerimaan Pihak ketiga</td><td>25.000.000</td></tr><tr><td>10</td><td>Pendapatan BLUD</td><td>27.627.034.184</td></tr><tr><td>11</td><td>Pendapatan denda administrasi PPAT</td><td>1.000.000</td></tr></table>	No	Uraian	Jumlah	1	Penerimaan jasa giro	4.735.000.000	2	Penerimaan bunga deposito	3.250.000.000	3	Tuntutan ganti rugi daerah	1.100.000.000	4	Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	120.000.000	5	Pendapatan denda pajak	45.000.000	6	Pendapatan denda retribusi	3.633.460	7	Pendapatan dari pengembalian		-	TASPEN	20.000.000	-	PEMILUKADA	2.300.000.000	-	Setoran lainnya	230.577.000	8	Fasilitas Sosial dan Fasum	60.000.000	9	Penerimaan Pihak ketiga	25.000.000	10	Pendapatan BLUD	27.627.034.184	11	Pendapatan denda administrasi PPAT	1.000.000
No	Uraian	Jumlah																																													
1	Penerimaan jasa giro	4.735.000.000																																													
2	Penerimaan bunga deposito	3.250.000.000																																													
3	Tuntutan ganti rugi daerah	1.100.000.000																																													
4	Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	120.000.000																																													
5	Pendapatan denda pajak	45.000.000																																													
6	Pendapatan denda retribusi	3.633.460																																													
7	Pendapatan dari pengembalian																																														
-	TASPEN	20.000.000																																													
-	PEMILUKADA	2.300.000.000																																													
-	Setoran lainnya	230.577.000																																													
8	Fasilitas Sosial dan Fasum	60.000.000																																													
9	Penerimaan Pihak ketiga	25.000.000																																													
10	Pendapatan BLUD	27.627.034.184																																													
11	Pendapatan denda administrasi PPAT	1.000.000																																													
2.	Penundaan DAU sebagaimana diamanatkan PMK 125, agar ada indikator dalam melakukan efisiensi belanja APBD agar mencerminkan rasa keadilan	2. Pemerintah Kabupaten Rembang telah melakukan langkah-langkah - dalam RAPBD 2016 : 1. Melakukan menyesuaikan terhadap pendapatan dan belanja daerah 2. Melakukan efisiensi terhadap belanja yang tidak menyangkut pelayan dasar dan pelayanan publik.																																													
3	Rekap data perolehan PAD dari Pajak dan Retribusi Daerah	3 Target Pajak Daerah setelah Perubahan sebesar Rp.216.963.928.144,- realisasi sebesar Rp.155.213.698.044,- atau 71% dengan rincian sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Jml</th><th>%</th></tr><tr><td>1</td><td>Pajak Hotel</td><td>502.008.550</td><td>66,93</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Restoran</td><td>1.601.687.470</td><td>91,52</td></tr><tr><td>3</td><td>Pajak Hiburan</td><td>90.067.500</td><td>51,47</td></tr><tr><td>4</td><td>Pajak Reklame</td><td>516.679.800</td><td>86,11</td></tr><tr><td>5</td><td>PPJU</td><td>9.027.023.896</td><td>66,87</td></tr></table>	No	Uraian	Jml	%	1	Pajak Hotel	502.008.550	66,93	2	Pajak Restoran	1.601.687.470	91,52	3	Pajak Hiburan	90.067.500	51,47	4	Pajak Reklame	516.679.800	86,11	5	PPJU	9.027.023.896	66,87																					
No	Uraian	Jml	%																																												
1	Pajak Hotel	502.008.550	66,93																																												
2	Pajak Restoran	1.601.687.470	91,52																																												
3	Pajak Hiburan	90.067.500	51,47																																												
4	Pajak Reklame	516.679.800	86,11																																												
5	PPJU	9.027.023.896	66,87																																												

No	PERTANYAAN	JAWABAN																																																				
		<table><tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Jml</th><th>%</th></tr><tr><td>6</td><td>Pajak Parkir</td><td>5.640.000</td><td>66,35</td></tr><tr><td>7</td><td>Pajak Air Tanah</td><td>107.570.800</td><td>76,84</td></tr><tr><td>8</td><td>Pajak Sarang Walet</td><td>2.555.000</td><td>51,10</td></tr><tr><td>9</td><td>BPHTB</td><td>4.702.546.605</td><td>99,00</td></tr><tr><td>10</td><td>Pajak Mineral</td><td>7.114.663.401</td><td>74,89</td></tr><tr><td>11</td><td>PBB</td><td>5.307.284.731</td><td>50,55</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Sedangkan target Retribusi Daerah sebesar Rp.20.743.370.500,- jumlah realisasi sebesar Rp.14.310.365.724,- atau 68,99%, dengan rincian : <table><tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Jml</th><th>%</th></tr><tr><td>1</td><td>Jasa Umum</td><td>2.346.600.700</td><td>73,31</td></tr><tr><td>2</td><td>Jasa Usaha</td><td>10.281.630.474</td><td>65,04</td></tr><tr><td>3</td><td>Perijinan tertentu</td><td>1.682.134.550</td><td>97,04</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No	Uraian	Jml	%	6	Pajak Parkir	5.640.000	66,35	7	Pajak Air Tanah	107.570.800	76,84	8	Pajak Sarang Walet	2.555.000	51,10	9	BPHTB	4.702.546.605	99,00	10	Pajak Mineral	7.114.663.401	74,89	11	PBB	5.307.284.731	50,55					No	Uraian	Jml	%	1	Jasa Umum	2.346.600.700	73,31	2	Jasa Usaha	10.281.630.474	65,04	3	Perijinan tertentu	1.682.134.550	97,04				
No	Uraian	Jml	%																																																			
6	Pajak Parkir	5.640.000	66,35																																																			
7	Pajak Air Tanah	107.570.800	76,84																																																			
8	Pajak Sarang Walet	2.555.000	51,10																																																			
9	BPHTB	4.702.546.605	99,00																																																			
10	Pajak Mineral	7.114.663.401	74,89																																																			
11	PBB	5.307.284.731	50,55																																																			
No	Uraian	Jml	%																																																			
1	Jasa Umum	2.346.600.700	73,31																																																			
2	Jasa Usaha	10.281.630.474	65,04																																																			
3	Perijinan tertentu	1.682.134.550	97,04																																																			

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	<u>IV.FRAKSI PDI PERJUANGAN - NASDEM</u>	
1	Penyusunan Program dan Kegiatan prioritas yang akan disusun dapat mencapai target dan mengacu pada RPJMD.	Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menyusun program – kegiatan telah memenuhi skala prioritas guna mendukung program-program pemerintah.
2	Penambahan Dana kapitasi agar seluruh masyarakat miskin bisa terakomodir guna memenuhi target Kuota JKN KIS.	Program JKN – KIS yang pelaksanaanya dilakukan oleh BPJS bidang Kesehatan di Kab. Rembang s.d saat ini jumlah pesertanya 441. 000 jiwa terdiri dari : 395.424 jiwa PBI dan 45.576 peserta non PBI. Untuk peserta PBI terdiri dari 394.000 jiwa PBI APBN , 1.830 jiwa PBI Provinsi dan 10.594 PBI APBD Kabupaten Rembang. Jumlah kemiskinan di Kab. Rembang sebesar 20% atau sekitar 130.000 jiwa sedangkan hasil pemutakhiran data base terbaru (PBDT) sebagai data yang dipakai tim penanggulangan kemiskinan sejumlah 350.000 jiwa. Dengan demikian warga miskin dan rawan miskin di Kab. Rembang sudah tercover dalam PBI, Namun demikian Pem. Kab Rembang masih mengintegrasikan JKRS ke dalam program JKN-KIS.
3	Pem Kab segera merealisasikan jaminan sosial dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan kepada Petani – Nelayan.	Akan kami lakukan kajian bersama BPJS Ketenagakerjaan terhadap program jaminan sosial kepada Petani – Nelayan.
4	Penganggaran dalam RPJMD dalam bentuk berbasis teknologi.	Terima kasih, kami telah melakukan studi terhadap penerapan terkait dengan <i>E-BUDGETING</i>

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	<u>V.FRAKSI GERINDRA</u>	
1	Minimnya penyerapan anggaran dalam APBD Induk 2016	Pemerintah Kabupaten Rembang telah berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah tercantum dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2016
2	PT. RBSJ agar lebih meningkatkan kinerjanya untuk memberikan DEVIDEN bagi Pemerintah Kabupaten Rembang	Berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) TUTUP BUKU Tahun 2015, PT. RBSJ memperoleh laba berjalan, namun mengingat sampai saat ini masih mempunyai akumulasi kerugian (sejak tahun 2010-2013 rugi) maka PT. RBSJ belum bisa setor deviden. Penggantian jajaran direksi akan kami tindaklanjuti.
3	Dalam pelaksanaan Pembangunan dan Pengurusan proses Perijinan pelabuhan harus merunut sesuai aturan yang berlaku.	Pembangunan Pelabuhan dan Proses pengurusan perijinan harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan.
	Pembangunan Pelabuhan berskala nasional di kab. Rembang	Terima kasih atas sarannya dan ditindaklanjuti, perlu kami jelaskan bahwa pembangunan pelabuhan baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun investor harus sesuai dengan Rencana induk Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dan berpedoman pada Keputusan Menteri Perhubungan R.I Nomor 414 tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
4	Pemerintah Kab Rembang agar segera melaksanakan Pesta Demokrasi Pilkades	Segera ditindaklanjuti, dengan terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XII/2015, Pemerintah Kabupaten Rembang harus merubah Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa, dan harus mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Bupati yang baru, dan penyusunan Peraturan Bupati baru sudah final pada minggu ini, sehingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bisa dilaksanakan pada akhir tahun 2016.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	VI. FRAKSI KARYA SEJAHTERA	
1.	Berkaitan dengan ditundanya DAU dari Pemerintah Pusat. Mohon penjelasan peningkatan PAD dari sektor BPHTB setelah munculnya PP No. 34 Tahun 2016 .	1. Lihat jawaban kami pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Perlu kami jelaskan bahwa pengenaan BPHTB didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 88 ayat (1) dan Perda No. 1 Tahun 2011 tentang BPHTB bahwa tarip BPHTB ditetapkan sebesar 5%. Sedangkan PP No. 34 tahun 2016 mengatur tentang Besarnya Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sebagaimana dituangkan pada Pasal 2 ayat (1) huruf a tarif PPh atas BPHTB ditetapkan sebesar 2,5% dari jumlah bruto
2.	Mohon penjelasan mengenai peningkatan lain- lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah dibandingkan APBD tahun 2015.	2. Karena adanya kenaikan antara lain Pendapatan dari BLUD, Jasa Giro, Deposito, Pendapatan dari Pengembalian Pemilukada.
3.	Dalam LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemkab. Rembang TA. 2015 SILPA sebesar Rp. 396.607.873.805,00 sementara dalam RAPBD Perubahan TA 2016 SILPA sebesar Rp. 389.396.816.969,00 mohon dijelaskan dengan adanya inkonsistensi tsb.	3. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan SILPA sebesar Rp. 389.396.816.969,00 merupakan SILPA murni dari APBD adapun SILPA audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2015 adalah penggabungan dari SILPA APBD, SILPA BLUD, JKN serta kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang harus disetor tahun 2015 tetapi baru disetor di tahun 2016, selisih tersebut akan disesuaikan terhadap belanja SKPD maupun BLUD.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
4.	Apakah Pemerintah Kab. Rembang sudah meminta penjelasan alasan Pemerintah Pusat menunda DAU?	4. Belum karena isi PMK terkait penundaan DAU sudah jelas.
5.	Dengan terbitnya Permenkeu NO. 125 Tahun 2016 adakah jaminan yang diberikan pemerintah atas terbayarnya DAU yang tertunda tersebut pada TA yang akan datang.	5. Belum adanya kepastian untuk disalurkan pada tahun anggaran yang akan datang dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
6.	Pemerintah Daerah agar menjelaskan program,kegiatan atau tindakan yang dilakukan atas dampak penundaan DAU tsb.	6. Lihat jawaban kami pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
7.	Penundaan DAU memberi pelajaran kepada Pemkab. Rembang untuk mencari terobosan pembiayaan pembangunan diluar pembiayaan APBD diantaranya dengan bekerjasama dengan pihak swasta atau memanfaatkan dana tanggung jawab sosial (CSR) dari perusahaan yang ada di Kab. Rembang.	7. Bahwa Pendapatan Daerah sumber dananya berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sedangkan dana CSR akan dilakukan kajian sesuai ketentuan yang berlaku.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	VII. FRAKSI HARAPAN	
1.	Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 20% atau Rp.36.156.249.644,- mengingat Tahun Anggaran 2016 hanya tersisa 3 bulan efektif tentu bukan hal yang mudah untuk mengejar kenaikan PAD tersebut.	1. Lihat jawaban kami pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Rapat Dewan dan Hadirin yang Saya hormati,

Demikian jawaban atas pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Untuk selanjutnya terhadap hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan secara teknis, kami mempersilahkan untuk dibahas dan diperdalam dalam pembahasan komisi-komisi.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 20 September 2016

BUPATI REMBANG



[Handwritten Signature]
H. ABDUL HAFIDZ



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016

Hari : SENIN
Tanggal : 26 September 2016
Waktu : 13.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT**:

1. Pembukaan;
2. Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
3. Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
4. Persetujuan Penetapan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dilanjutkan Penandatanganan Persetujuan dan Penyerahan Keputusan DPRD;
5. Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
6. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: 7 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 1 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	: 36 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Demokrat	: 1 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 4 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	: 9 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat	Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang saya hormati	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Instansi, Kantor, Bagian, dan Camat se Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Pimpinan Partai Politik, LSM, wartawan dan semua hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna ini, perkenalkan saya mengajak semua hadirin yang ada di sini, untuk memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, kita semua dapat hadir mengikuti Rapat Paripurna Ketiga DPRD membahas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita sekalian. Amiin.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 ini, dalam pembahasannya sangat menguras energi serta pikiran dan dilakukan melalui berbagai tahapan-tahapan rapat. Baik yang sifatnya internal yakni dibahas oleh DPRD sendiri, maupun yang sifatnya eksternal yakni dibahas oleh DPRD bersama eksekutif. Adapun rapat paripurna ini merupakan rapat terakhir dalam membahas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, dengan agenda pokok Laporan Banggar atas hasil pembahasan Raperda, Pendapat Fraksi atas Raperda, Persetujuan atas Raperda, dan Pendapat Akhir Bupati atas hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam rapat paripurna ini adalah sebanyak 36 orang.

Adapun ketentuan kuorum Rapat Paripurna Ketiga ini, adalah sama dengan ketentuan kuorum yang berlaku pada rapat paripurna pertama dan kedua tanggal 20 September 2016 dalam membahas Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, yakni dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. Dengan demikian rapat paripurna telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan membaca "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 14.50 WIB Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Selengkapnya akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;
3. Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;
4. Persetujuan Penetapan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, dilanjutkan Penandatanganan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang dan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda;
5. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;
6. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Untuk keperluan tersebut, saya mohon kepada Sekretaris Badan Anggaran Saudara Drs. Achmad Mualif berkenan menyampaikannya. Dipersilahkan.

=== PEMBACAAN LAPORAN BADAN ANGGARAN ===

- ***(Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 terlampir)***

Terimakasih Saudara Saudara Drs. Achmad Mualif atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuki acara ketiga yaitu Pendapat Fraksi atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Kepada Saudara-saudara yang ditunjuk untuk menyampaikan pendapat fraksi saya persilahkan menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Muhammad Zaenuri
2. Fraksi Demokrat : Sdr. Mugiyarto, S.T.
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Ilyas
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Sdri. Nanik Sri Sundari
5. Fraksi Partai Gerindra : Sdr. H. Yudianto, S.H.
6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr. H. Ismari, S.H.
7. Fraksi Harapan : Sdri. Sahningsih, S.E.

Secara berurutan dimulai dari juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dipersilahkan untuk menyampaikan pendapat akhirnya.

Dipersilahkan.

Fraksi	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	√		
Fraksi Demokrat	√		
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	√		
Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	√		
Fraksi Partai Gerindra	√		
Fraksi Karya Sejahtera	√		
Fraksi Harapan	√		

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaianannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Dari Laporan Badan Anggaran maupun Pendapat Fraksi-Fraksi, sudah dapat disimpulkan apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dapat disetujui, disetujui dengan pengubahan atau ditolak menjadi Peraturan Daerah. Namun di dalam keabsahannya perlu persetujuan terlebih dahulu dari rekan-rekan anggota DPRD.

Untuk itu saya tawarkan kepada Saudara-Saudara Anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini :

“Apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 yang dilaporkan oleh Badan Anggaran DPRD dapat disetujui ?”

=====SETUJUUUUU=====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Dengan telah diberikannya persetujuan oleh anggota, selanjutnya akan dilakukan Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang atas Raperda, dan diteruskan dengan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda. Agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, dimohon kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk memandu jalannya prosesi.

Untuk itu, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD.

**===== PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA DAN
PENYERAHAN KEPUTUSAN DPRD=====**

Terima kasih Saudara Sekretaris DPRD yang telah memandu jalannya prosesi penandatanganan persetujuan bersama dan penyerahan keputusan DPRD.

Dari Persetujuan Bersama anantara Bupati dan DPRD Kabupaten Rembang atas raperda, oleh Bupati akan disusun Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran

2016, yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Marilah kita masuki acara terakhir yaitu Penyampaian Pendapat Akhir Bupati Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan.

====PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR BUPATI ====

- ***(Pendapat Akhir Bupati Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 terlampir)***

Terima kasih saudara Bupati atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Acara demi acara dalam rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat paripurna ini. Terima kasih kepada Saudara Bupati beserta jajarannya, rekan-rekan Anggota baik yang masuk dalam Komisi maupun Badan Anggaran serta Sekretaris DPRD beserta seluruh staf yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, sehingga pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dapat berjalan lancar sesuai waktu yang telah dijadwalkan.

Kepada saudara-saudara yang telah mengikuti rapat , kami atas nama Pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat paripurna.

Dengan mengucap “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 16.05 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

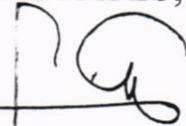
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

K E T U A,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS,



Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

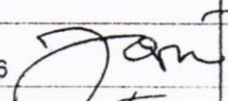
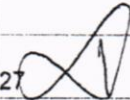
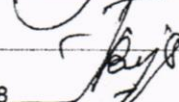
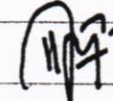
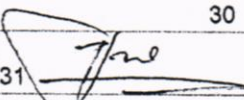
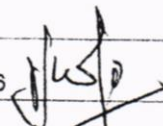
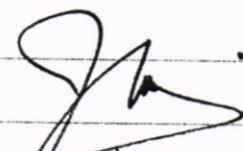
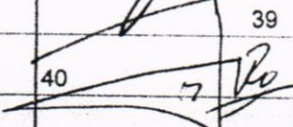
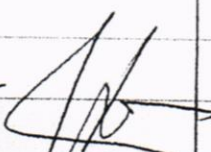
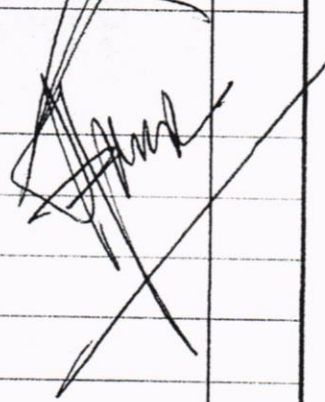
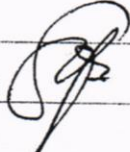
**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (III) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD
dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan
Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran
2016;
- LAMPIRAN III : Pendapat Fraksi- Fraksi terhadap Raperda
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
- LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Nomor ..19.. Tahun 2016
Tentang Persetujuan Penetapan Raperda
Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2016;
- LAMPIRAN V : Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan
Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran
2016;
- LAMPIRAN VI : Berita Acara Nomor : 900/...517...../ 2016,
900/...2054.../2016 tentang Persetujuan
Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten
Rembang tentang Raperda Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2016.

**RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD TH 2016**

**HARI/TANGGAL : SELASA , 26 SEPTEMBER 2016
PUKUL : 13.00 WIB**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	✓
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	WASIMAN	Anggota	23	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24	

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM				
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25 ✓	
26	JASMANI	Anggota	26 	
27	WIDODO	Anggota	27 	
28	ALI IRCHAM, S.T	Anggota	28 	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29 	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M	Anggota	30 	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31 	
32	MUHAMMAD BHAUD DUROR, Spi	Anggota	32	
FRAKSI PARTAI GERINDRA				
33	HERI KURNIAWAN, S.E	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, S.P, M.H	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H	Anggota	36 	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
FRAKSI KARYA SEJAHTERA				
38	H. ISMARI, S.H	Anggota	38 	
39	GATOT PAERAN, S.H, MSi	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H	Anggota	40 	
41	CATUR WINANTO, S.H	Anggota	41 	
FRAKSI HARAPAN				
42	SUKARMAIN	Anggota	42 	
43	SAHNINGSIH, S.E	Anggota	43 	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd	Anggota	44	
45	NUR JANNAH	Anggota	45 ✓	

eterangan :

1 I : Ijin

2 S : Sakit

3 C : Cuti

4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. MAJID KAMIL MZ

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA PERUBAHAN APBD TH 2016

HARI : SELASA , 26 SEPTEMBER 2016
PUKUL : 13.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	<u>BINTARNO, SH</u>	Kejaksaan Negeri Rembang	3. 
4		Pengadilan Negeri Rembang	4.
5		Dandim 0720 Rembang	5.
6		Kepolisian Resort Rembang	6.
7		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Ir. HARI SUSANTO, M. Si	Pj Sekretaris Daerah	8. 

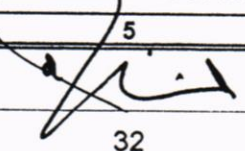
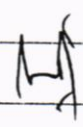
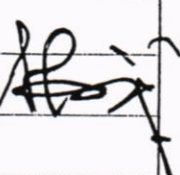
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

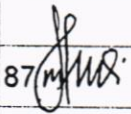
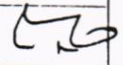
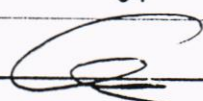
Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA PERUBAHAN APBD TH 2016**

HARI : SELASA , 26 SEPTEMBER 2016
PUKUL : 13.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Nov Effendi	STB	1
2	STAF AHLI BUPATI	Kartono	SA	2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	Pratomo	Kep. Humas	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Ang-nomasto	Kesra	13
14	BAG. ADM. KEUANGAN			14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	Suranto	Orges	15
16	BAG. UMUM			16
17	DPPKAD	Musbin	DPPK	17
18	INSPEKTORAT			18
19	BAPPEDA			19
20	BPMPKB	NGATINI	Sebut	20
21	B K D	Bambang R.	Kabid	21
22	BKP & P4K			22
23	B P B D	IRGMASTO	Ka. Fi	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	Triyoto	Sebut	24
25	DINAS KESEHATAN	Prifto Utomo	Sebut	25
26	DINAS PENDIDIKAN	Nov Effendi	PH. Pendidikan	26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM			27
28	DINTANHUT	Suratman		28
29	DINLUTKAN	BUDIYONO	Sebut	29
30	DISHUBKOMINFO			30

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
31	DINAS DUKCAPIL	SAEPRIYARSONO		31 
32	DINSOSNAKERTRANS			32
33	DINBUDPARPORA			33
34	DINAS ENERGI & SDM			34
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Purnandi Samudra	ka	35 
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	Didih	ka 94	36 
37	KANTOR PERPUST & ARSIP			37
38	KANTOR KPPT			38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO			39
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41
42	P D A M			42
43	PERCETAKAN DAERAH			43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			50
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG			52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60
61	B P N KAB. REMBANG			61
62	KANTOR PAJAK			62
63	UP3AD (ASET DAERAH)			63
64	KANTOR PELABUHAN			64

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG			65
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN			71
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG			74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA			85
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM	MASUOI	Reporter	87 
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT	A. MUSLICH		92 
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95		A Wasfani	TA FIS	95 

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96	Kodiam	Agus	Putri Dian	96
97	Tri Nur Huda	Humas		97
98	Xuan Lito			98
99	Pondy	Humas		99
100				100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105
106				106
107				107
108				108
109				109
110				110
111				111
112				112
113				113
114				114
115				115
116				116
117				117
118				118
119				119
120				120
121				121
122				122
123				123
124				124
125				125

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN
REMBANG**



TENTANG

**PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN
APBD KABUPATEN REMBANG**

TAHUN ANGGARAN 2016



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 perlu diadakan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ;
2. Bahwa hasil pembahasan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dilaporkan oleh Badan Anggaran pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

II. DASAR

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
9. Surat Bupati Rembang Nomor 188.3/1998/2016 tanggal 19 September 2016 perihal Pengiriman Raperda;
10. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dengan TAPD Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 5 September 2016 yang mengagendakan Penjadwalan ulang pembahasan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

III. PELAKSANAAN

- a. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada tanggal 21 September 2016 Jam 19.00 WIB dengan acara penjelasan lanjutan atas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.
- b. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi – komisi DPRD Kabupaten Rembang yang dilakukan pada tanggal 21 September 2016 Jam 11.00 WIB membahas Strategi dan distribusi Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
- c. Rapat-rapat Komisi A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Rembang dengan SKPD / Instansi terkait dilaksanakan pada :

Hari : Rabu – Jum'at

Tanggal : 21 sampai dengan 23 September 2016
Jam : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Komisi A,B,C dan D DPRD
Kabupaten Rembang
Acara : Pendalaman Raperda tentang
Perubahan APBD Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2016

d. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-komisi
DPRD Kabupaten Rembang pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 23 September 2016
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD
Kabupaten Rembang
Acara : Penyampaian Laporan Komisi kepada
Banggar atas pendalaman Raperda
tentang Perubahan APBD Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2016

e. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD pada :

Hari : Senin
Tanggal : 26 September 2016
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD
Kabupaten Rembang
Acara : Sinkronisasi dan koordinasi hasil
pembahasan Raperda Perubahan APBD
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran
2016.

IV. HASIL RAPAT

Badan Anggggaran DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Adapun ringkasannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

HASIL PEMBAHASAN
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2016

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	PEMBAHASAN		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		PERSETUJUAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7= 6-3	8 = 6-4
1	PENDAPATAN DAERAH	1.596.566.692.500	1.489.759.742.455	(106.806.950.045)	1.490.592.742.455	(105.973.950.045)	833.000.000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	180.807.678.500	216.963.928.144	36.156.249.644	217.796.928.144	36.989.249.644	833.000.000
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	38.153.500.000	41.678.500.000	3.525.000.000	41.678.500.000	3.525.000.000	-
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	27.853.821.500	20.743.370.500	(7.110.451.000)	20.893.370.500	(6.960.451.000)	150.000.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.340.000.000	6.564.456.000	224.456.000	6.564.456.000	224.456.000	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang	108.460.357.000	147.977.601.644	39.517.244.644	148.660.601.644	40.200.244.644	683.000.000
1.2	Dana Perimbangan	970.288.185.000	853.094.941.578	(117.193.243.422)	853.094.941.578	(117.193.243.422)	-
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan	28.052.000.000	21.449.240.000	(6.602.760.000)	21.449.240.000	(6.602.760.000)	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	785.380.985.000	671.800.490.578	(113.580.494.422)	671.800.490.578	(113.580.494.422)	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	156.855.200.000	144.904.641.000	(11.950.559.000)	144.904.641.000	(11.950.559.000)	-
1.2.4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	14.940.570.000	14.940.570.000	14.940.570.000	14.940.570.000	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	445.470.829.000	419.700.872.733	(25.769.956.267)	419.700.872.733	(25.769.956.267)	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.566.904.000	1.566.904.000	-	1.566.904.000	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya	75.549.967.000	103.866.595.183	28.316.628.183	103.866.595.183	28.316.628.183	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	368.353.958.000	286.903.900.550	(81.450.057.450)	286.903.900.550	(81.450.057.450)	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	27.363.473.000	27.363.473.000	27.363.473.000	27.363.473.000	-
2.	BELANJA DAERAH	1.937.216.565.110	1.866.831.560.524	(70.385.004.586)	1.874.875.616.260	(62.340.948.850)	8.044.055.736
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.151.214.323.000	1.042.068.589.336	(109.145.733.664)	1.041.333.948.337	(109.880.374.663)	(734.640.999)
2.1.1	Belanja Pegawai	808.954.601.000	705.705.762.836	(103.248.838.164)	705.573.121.837	(103.381.479.163)	(132.640.999)
2.1.2	Belanja Bunga	37.000.000	37.000.000	-	37.000.000	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	8.237.928.000	31.383.060.500	23.145.132.500	29.947.605.500	21.709.677.500	(1.435.455.000)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.470.000.000	7.330.000.000	860.000.000	7.700.000.000	1.230.000.000	370.000.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.455.961.000	6.455.961.000	-	6.455.961.000	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	320.058.833.000	290.387.430.000	(29.671.403.000)	290.850.885.000	(29.207.948.000)	463.455.000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	769.375.000	(230.625.000)	769.375.000	(230.625.000)	-
2.2	Belanja Langsung	786.002.242.110	824.762.971.188	38.760.729.078	833.541.667.923	47.539.425.813	8.778.696.735
2.2.1	Belanja Pegawai	138.340.513.800	152.074.644.150	13.734.130.350	154.416.819.749	16.076.305.949	2.342.175.599
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	259.780.056.745	245.731.013.335	(14.049.043.410)	250.126.512.221	(9.653.544.524)	4.395.498.886
2.2.3	Belanja Modal	387.881.671.565	426.957.313.703	39.075.642.138	428.998.335.953	41.116.664.388	2.041.022.250
	Jumlah Belanja	1.937.216.565.110	1.866.831.560.524	(70.385.004.586)	1.874.875.616.260	(62.340.948.850)	8.044.055.736
	surplus (devisit)	(340.649.872.610)	(377.071.818.069)	(36.421.945.459)	(384.282.873.805)	(43.633.001.195)	(7.211.055.736)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	352.974.872.610	389.396.818.069	36.421.945.459	396.607.873.805	43.633.001.195	7.211.055.736
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	352.974.872.610	389.396.818.069	36.421.945.459	396.607.873.805	43.633.001.195	7.211.055.736
	Jumlah penerimaan Pembiayaan	352.974.872.610	389.396.818.069	36.421.945.459	396.607.873.805	43.633.001.195	7.211.055.736
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	12.325.000.000	12.325.000.000	-	12.325.000.000	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	12.270.000.000	12.270.000.000	-	12.270.000.000	-	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	55.000.000	55.000.000	-	55.000.000	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.325.000.000	12.325.000.000	-	12.325.000.000	-	-
	Pembiayaan Netto	340.649.872.610	377.071.818.069	36.421.945.459	384.282.873.805	43.633.001.195	7.211.055.736
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	-	-	-	-	-	-

NO.	SKPD	JUMLAH			
		SEBELUM PERUBAHAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	2	4	5	6	7
1	DINAS PENDIDIKAN		575.387.143.000	82.462.958.700	657.850.101.700
2	DINAS KESEHATAN	33.026.569.000	40.992.314.000	110.200.449.840	151.192.763.840
3	RSUD dr R. SOETRASNO	70.000.000.000	25.066.055.000	91.419.042.376	116.485.097.376
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	2.255.000.000	14.979.035.000	207.302.907.048	222.281.942.048
5	BAPPEDA		3.538.165.000	7.590.432.000	11.128.597.000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.143.864.000	5.867.437.000	4.675.866.000	10.543.303.000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP		2.707.932.000	3.443.490.000	6.151.422.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	3.006.935.000	3.037.641.800	6.044.576.800
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		9.576.217.000	10.016.816.310	19.593.033.310
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		5.586.256.000	7.598.628.000	13.184.884.000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	2.800.000.000	9.490.304.000	22.093.366.749	31.583.670.749
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1.540.569.000	3.990.469.000	5.531.038.000
13	SATPOL PP		3.551.407.000	7.126.717.000	10.678.124.000
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		2.176.828.000	5.997.000.000	8.173.828.000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		8.986.081.000	-	8.986.081.000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		749.821.000	-	749.821.000
17	SETDA	6.493.500.000	13.768.098.000	36.685.440.000	50.453.538.000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	21.000.000	-	11.425.000.000	11.425.000.000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)		-	998.200.000	998.200.000
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	90.000.000	13.768.098.000	4.461.600.000	18.229.698.000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)		-	9.390.000.000	9.390.000.000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	42.500.000	-	1.650.140.000	1.650.140.000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)		-	3.475.000.000	3.475.000.000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)		-	1.470.500.000	1.470.500.000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	6.340.000.000	-	1.815.000.000	1.815.000.000
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)		-	2.000.000.000	2.000.000.000
18	SEKRETARIAT DPRD		3.857.961.000	21.123.571.000	24.981.532.000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.467.377.514.000	354.620.568.000	15.593.621.000	370.214.189.000
a	(SKPD)	51.618.500.000	12.360.846.000	15.593.621.000	27.954.467.000
b	(PPKD)	1.415.759.014.000	342.259.722.000	-	342.259.722.000
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		3.559.470.000	6.058.590.000	9.618.060.000
21	BKD		3.612.976.000	7.121.062.000	10.734.038.000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU		1.456.104.000	1.482.520.000	2.938.624.000
23	KECAMATAN REMBANG		5.557.777.000	2.874.880.000	8.432.657.000
24	KECAMATAN KALIORI		2.212.168.000	742.304.000	2.954.472.000
25	KECAMATAN SULANG		1.813.473.000	796.644.000	2.610.117.000
26	KECAMATAN SUMBER		1.881.138.000	693.100.000	2.574.238.000
27	KECAMATAN BULU		1.629.590.000	763.560.000	2.393.150.000
28	KECAMATAN LASEM		2.096.173.000	750.104.000	2.846.277.000
29	KECAMATAN PANCUR		2.222.979.000	729.600.000	2.952.579.000
30	KECAMATAN SLUKE		1.724.912.000	719.600.000	2.444.512.000
31	KECAMATAN PAMOTAN		1.716.400.000	758.360.000	2.474.760.000
32	KECAMATAN GUNEM		1.708.365.000	760.360.000	2.468.725.000
33	KECAMATAN SALE		1.620.884.000	756.730.000	2.377.614.000
34	KECAMATAN KRAGAN		2.158.113.000	1.086.626.000	3.244.739.000
35	KECAMATAN SEDAN		1.872.280.000	759.220.000	2.631.500.000
36	KECAMATAN SARANG		1.989.290.000	849.400.000	2.838.690.000
37	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN		8.776.994.000	6.224.228.000	15.001.222.000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		2.020.180.000	2.213.280.000	4.233.460.000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	133.472.000	6.596.795.000	54.878.935.472	61.475.730.472
40	DINAS ESDM		2.468.148.000	14.693.015.000	17.161.163.000
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.058.000.000	2.766.281.000	12.000.590.000	14.766.871.000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.278.773.500	4.304.707.000	27.931.116.815	32.235.823.815
	JUMLAH	1.596.566.692.500	1.151.214.323.000	786.002.242.110	1.937.216.565.110

NO.	SKPD	JUMLAH			
		SETELAH PERUBAHAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	8	9	10	11=9+10
1	DINAS PENDIDIKAN		475.181.543.836	97.098.335.700	572.279.879.536
2	DINAS KESEHATAN	42.652.634.184	40.185.359.000	117.397.924.386	157.583.283.386
3	RSUD dr R. SOETRASNO	80.000.000.000	24.627.248.000	102.139.042.376	126.766.290.376
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	2.255.000.000	14.878.425.000	205.532.900.048	220.411.325.048
5	BAPPEDA		3.505.652.000	9.515.432.000	13.021.084.000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.707.637.460	5.743.451.000	5.230.471.000	10.973.922.000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP		2.782.101.000	3.614.490.000	6.396.591.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	3.007.752.000	2.987.641.800	5.995.393.800
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		9.115.144.000	11.528.421.310	20.643.565.310
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		5.371.793.000	7.709.798.000	13.081.591.000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	2.913.378.000	9.335.584.000	26.852.017.749	36.187.601.749
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1.545.620.000	5.208.060.000	6.753.680.000
13	SATPOL PP		3.543.615.000	6.749.098.000	10.292.713.000
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		2.179.310.000	3.491.904.000	5.671.214.000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		10.350.313.000	-	10.350.313.000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		801.590.000	-	801.590.000
17	SETDA	6.696.956.000	13.439.930.000	40.107.640.000	53.547.570.000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	13.007.300.000	13.007.300.000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)		-	763.200.000	763.200.000
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	90.000.000	13.439.930.000	5.331.600.000	18.771.530.000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)		-	10.173.900.000	10.173.900.000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	42.500.000	-	1.650.140.000	1.650.140.000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)		-	3.446.000.000	3.446.000.000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)		-	1.920.500.000	1.920.500.000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	6.564.456.000	-	1.815.000.000	1.815.000.000
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)		-	2.000.000.000	2.000.000.000
18	SEKRETARIAT DPRD		3.880.993.000	19.414.040.000	23.295.033.000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.339.765.891.311	347.961.372.500	16.004.942.532	363.966.315.032
a	(SKPD)	66.970.077.000	11.598.546.000	16.004.942.532	27.603.488.532
b	(PPKD)	1.272.795.814.311	336.362.826.500	-	336.362.826.500
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		3.390.197.000	6.308.590.000	9.698.787.000
21	BKD		3.723.486.000	7.318.445.000	11.041.931.000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU		1.518.791.000	1.422.520.000	2.941.311.000
23	KECAMATAN REMBANG		5.390.741.000	3.428.384.000	8.819.125.000
24	KECAMATAN KALIORI		2.134.119.000	777.204.000	2.911.323.000
25	KECAMATAN SULANG		1.848.738.000	1.285.144.000	3.133.882.000
26	KECAMATAN SUMBER		1.774.267.000	720.100.000	2.494.367.000
27	KECAMATAN BULU		1.708.716.000	847.560.000	2.556.276.000
28	KECAMATAN LASEM		2.018.964.000	776.104.000	2.795.068.000
29	KECAMATAN PANCUR		2.169.164.000	758.600.000	2.927.764.000
30	KECAMATAN SLUKE		1.574.618.000	736.600.000	2.311.218.000
31	KECAMATAN PAMOTAN		1.686.489.000	796.360.000	2.482.849.000
32	KECAMATAN GUNEM		1.717.082.000	780.970.000	2.498.052.000
33	KECAMATAN SALE		1.606.679.000	831.925.000	2.438.604.000
34	KECAMATAN KRAGAN		2.006.595.000	1.309.626.000	3.316.221.000
35	KECAMATAN SEDAN		1.834.480.000	692.220.000	2.526.700.000
36	KECAMATAN SARANG		2.153.202.000	881.400.000	3.034.602.000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN		8.441.572.000	6.166.198.000	14.607.770.000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		2.060.726.000	2.303.280.000	4.364.006.000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	121.472.000	6.468.443.000	49.964.310.472	56.432.753.472
40	DINAS ESDM		2.405.945.000	14.543.015.000	16.948.960.000
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.058.000.000	2.654.327.000	14.020.140.000	16.674.467.000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.588.773.500	4.344.452.000	27.512.116.815	31.856.568.815
	JUMLAH	1.489.759.742.455	1.042.068.589.336	824.762.971.188	1.866.831.560.524

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD R PERUBAHAN .

NO.	SKPD	BERTAMBAH (BERKURANG)			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	12=8-4	13=9-5	14=10-6	15=13+14
1	DINAS PENDIDIKAN	-	(100.205.599.164)	14.635.377.000	(85.570.222.164)
2	DINAS KESEHATAN	9.626.065.184	(806.955.000)	7.197.474.546	6.390.519.546
3	RSUD dr R. SOETRASNO	10.000.000.000	(438.807.000)	10.720.000.000	10.281.193.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	(100.610.000)	(1.770.007.000)	(1.870.617.000)
5	BAPPEDA	-	(32.513.000)	1.925.000.000	1.892.487.000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(436.226.540)	(123.986.000)	554.605.000	430.619.000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	-	74.169.000	171.000.000	245.169.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	817.000	(50.000.000)	(49.183.000)
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	(461.073.000)	1.511.605.000	1.050.532.000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	(214.463.000)	111.170.000	(103.293.000)
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	113.378.000	(154.720.000)	4.758.651.000	4.603.931.000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	5.051.000	1.217.591.000	1.222.642.000
13	SATPOL PP	-	(7.792.000)	(377.619.000)	(385.411.000)
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	2.482.000	(2.505.096.000)	(2.502.614.000)
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	1.364.232.000	-	1.364.232.000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	51.769.000	-	51.769.000
17	SETDA	203.456.000	(328.168.000)	3.422.200.000	3.094.032.000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	(21.000.000)	-	1.582.300.000	1.582.300.000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	(235.000.000)	(235.000.000)
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	-	(328.168.000)	870.000.000	541.832.000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	783.900.000	783.900.000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	(29.000.000)	(29.000.000)
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	450.000.000	450.000.000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	224.456.000	-	-	-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-
18	SEKRETARIAT DPRD	-	23.032.000	(1.709.531.000)	(1.686.499.000)
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(127.611.622.689)	(6.659.195.500)	411.321.532	(6.247.873.968)
a	(SKPD)	15.351.577.000	(762.300.000)	411.321.532	(350.978.468)
b	(PPKD)	(142.963.199.689)	(5.896.895.500)	-	(5.896.895.500)
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	(169.273.000)	250.000.000	80.727.000
21	BKD	-	110.510.000	197.383.000	307.893.000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	-	62.687.000	(60.000.000)	2.687.000
23	KECAMATAN REMBANG	-	(167.036.000)	553.504.000	386.468.000
24	KECAMATAN KALIORI	-	(78.049.000)	34.900.000	(43.149.000)
25	KECAMATAN SULANG	-	35.265.000	488.500.000	523.765.000
26	KECAMATAN SUMBER	-	(106.871.000)	27.000.000	(79.871.000)
27	KECAMATAN BULU	-	79.126.000	84.000.000	163.126.000
28	KECAMATAN LASEM	-	(77.209.000)	26.000.000	(51.209.000)
29	KECAMATAN PANCUR	-	(53.815.000)	29.000.000	(24.815.000)
30	KECAMATAN SLUKE	-	(150.294.000)	17.000.000	(133.294.000)
31	KECAMATAN PAMOTAN	-	(29.911.000)	38.000.000	8.089.000
32	KECAMATAN GUNEM	-	8.717.000	20.610.000	29.327.000
33	KECAMATAN SALE	-	(14.205.000)	75.195.000	60.990.000
34	KECAMATAN KRAGAN	-	(151.518.000)	223.000.000	71.482.000
35	KECAMATAN SEDAN	-	(37.800.000)	(67.000.000)	(104.800.000)
36	KECAMATAN SARANG	-	163.912.000	32.000.000	195.912.000
37	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN	-	(335.422.000)	(58.030.000)	(393.452.000)
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	-	40.546.000	90.000.000	130.546.000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	(12.000.000)	(128.352.000)	(4.914.625.000)	(5.042.977.000)
40	DINAS ESDM	-	(62.203.000)	(150.000.000)	(212.203.000)
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	(111.954.000)	2.019.550.000	1.907.596.000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.310.000.000	39.745.000	(419.000.000)	(379.255.000)
	JUMLAH	(106.806.950.045)	(109.145.733.664)	38.760.729.078	(70.385.004.586)

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		PERSETUJUAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	16	17	18	19=17+18
1	DINAS PENDIDIKAN		475.181.652.837	96.823.335.700	572.004.988.537
2	DINAS KESEHATAN	42.652.634.184	40.185.359.000	124.202.961.145	164.388.320.145
3	RSUD dr R. SOETRASNO	80.000.000.000	24.627.248.000	102.529.952.352	127.157.200.352
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	2.255.000.000	14.878.425.000	205.747.900.048	220.626.325.048
5	BAPPEDA		3.505.652.000	9.515.432.000	13.021.084.000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.707.637.460	5.743.451.000	5.300.471.000	11.043.922.000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP		2.782.101.000	4.254.490.000	7.036.591.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	3.007.752.000	2.987.641.800	5.995.393.800
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		9.115.144.000	11.693.421.310	20.808.565.310
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		5.371.793.000	7.709.798.000	13.081.591.000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	3.063.378.000	9.335.584.000	26.852.017.749	36.187.601.749
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1.545.620.000	5.208.060.000	6.753.680.000
13	SATPOL PP		3.543.615.000	6.749.098.000	10.292.713.000
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		2.179.310.000	3.491.904.000	5.671.214.000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		10.217.563.000	-	10.217.563.000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		801.590.000	-	801.590.000
17	SETDA	6.696.956.000	13.439.930.000	40.557.640.000	53.997.570.000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	13.007.300.000	13.007.300.000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)		-	763.200.000	763.200.000
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	90.000.000	13.439.930.000	5.331.600.000	18.771.530.000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)		-	10.173.900.000	10.173.900.000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	42.500.000	-	1.650.140.000	1.650.140.000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)		-	3.596.000.000	3.596.000.000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)		-	2.220.500.000	2.220.500.000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	6.564.456.000	-	1.815.000.000	1.815.000.000
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)		-	2.000.000.000	2.000.000.000
18	SEKRETARIAT DPRD		3.880.993.000	19.546.790.000	23.427.783.000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.340.448.891.311	347.359.372.500	16.004.942.532	363.364.315.032
a	(SKPD)	67.653.077.000	11.598.546.000	16.004.942.532	27.603.488.532
b	(PPKD)	1.272.795.814.311	335.760.826.500	-	335.760.826.500
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		3.390.197.000	6.308.590.000	9.698.787.000
21	BKD		3.723.486.000	7.318.445.000	11.041.931.000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU		1.518.791.000	1.422.520.000	2.941.311.000
23	KECAMATAN REMBANG		5.390.741.000	3.528.384.000	8.919.125.000
24	KECAMATAN KALIORI		2.134.119.000	777.204.000	2.911.323.000
25	KECAMATAN SULANG		1.848.738.000	1.385.144.000	3.233.882.000
26	KECAMATAN SUMBER		1.774.267.000	720.100.000	2.494.367.000
27	KECAMATAN BULU		1.708.716.000	847.560.000	2.556.276.000
28	KECAMATAN LASEM		2.018.964.000	776.104.000	2.795.068.000
29	KECAMATAN PANCUR		2.169.164.000	758.600.000	2.927.764.000
30	KECAMATAN SLUKE		1.574.618.000	736.600.000	2.311.218.000
31	KECAMATAN PAMOTAN		1.686.489.000	796.360.000	2.482.849.000
32	KECAMATAN GUNEM		1.717.082.000	780.970.000	2.498.052.000
33	KECAMATAN SALE		1.606.679.000	831.925.000	2.438.604.000
34	KECAMATAN KRAGAN		2.006.595.000	1.309.626.000	3.316.221.000
35	KECAMATAN SEDAN		1.834.480.000	692.220.000	2.526.700.000
36	KECAMATAN SARANG		2.153.202.000	881.400.000	3.034.602.000
37	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN		8.441.572.000	6.166.198.000	14.607.770.000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		2.060.726.000	2.303.280.000	4.364.006.000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	121.472.000	6.468.443.000	49.949.310.472	56.417.753.472
40	DINAS ESDM		2.405.945.000	14.543.015.000	16.948.960.000
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.058.000.000	2.654.327.000	14.020.140.000	16.674.467.000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.588.773.500	4.344.452.000	27.512.116.815	31.856.568.815
	JUMLAH	1.490.592.742.455	1.041.333.948.337	833.541.667.923	1.874.875.616.260

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	20=16-4	21=17-5	22=18-6	23=21+22
1	DINAS PENDIDIKAN	-	(100.205.490.163)	14.360.377.000	(85.845.113.163)
2	DINAS KESEHATAN	9.626.065.184	(806.955.000)	14.002.511.305	13.195.556.305
3	RSUD dr R. SOETRASNO	10.000.000.000	(438.807.000)	11.110.909.976	10.672.102.976
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	(100.610.000)	(1.555.007.000)	(1.655.617.000)
5	BAPPEDA	-	(32.513.000)	1.925.000.000	1.892.487.000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(436.226.540)	(123.986.000)	624.605.000	500.619.000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	-	74.169.000	811.000.000	885.169.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	817.000	(50.000.000)	(49.183.000)
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	(461.073.000)	1.676.605.000	1.215.532.000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	(214.463.000)	111.170.000	(103.293.000)
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	263.378.000	(154.720.000)	4.758.651.000	4.603.931.000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	5.051.000	1.217.591.000	1.222.642.000
13	SATPOL PP	-	(7.792.000)	(377.619.000)	(385.411.000)
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	2.482.000	(2.505.096.000)	(2.502.614.000)
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	1.231.482.000	-	1.231.482.000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	51.769.000	-	51.769.000
17	SETDA	203.456.000	(328.168.000)	3.872.200.000	3.544.032.000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	(21.000.000)	-	1.582.300.000	1.582.300.000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	(235.000.000)	(235.000.000)
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	-	(328.168.000)	870.000.000	541.832.000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	783.900.000	783.900.000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	121.000.000	121.000.000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	750.000.000	750.000.000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	224.456.000	-	-	-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-
18	SEKRETARIAT DPRD	-	23.032.000	(1.576.781.000)	(1.553.749.000)
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(126.928.622.689)	(7.261.195.500)	411.321.532	(6.849.873.968)
a	(SKPD)	16.034.577.000	(762.300.000)	411.321.532	(350.978.468)
b	(PPKD)	(142.963.199.689)	(6.498.895.500)	-	(6.498.895.500)
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	(169.273.000)	250.000.000	80.727.000
21	BKD	-	110.510.000	197.383.000	307.893.000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	-	62.687.000	(60.000.000)	2.687.000
23	KECAMATAN REMBANG	-	(167.036.000)	653.504.000	486.468.000
24	KECAMATAN KALIORI	-	(78.049.000)	34.900.000	(43.149.000)
25	KECAMATAN SULANG	-	35.265.000	588.500.000	623.765.000
26	KECAMATAN SUMBER	-	(106.871.000)	27.000.000	(79.871.000)
27	KECAMATAN BULU	-	79.126.000	84.000.000	163.126.000
28	KECAMATAN LASEM	-	(77.209.000)	26.000.000	(51.209.000)
29	KECAMATAN PANCUR	-	(53.815.000)	29.000.000	(24.815.000)
30	KECAMATAN SLUKE	-	(150.294.000)	17.000.000	(133.294.000)
31	KECAMATAN PAMOTAN	-	(29.911.000)	38.000.000	8.089.000
32	KECAMATAN GUNEM	-	8.717.000	20.610.000	29.327.000
33	KECAMATAN SALE	-	(14.205.000)	75.195.000	60.990.000
34	KECAMATAN KRAGAN	-	(151.518.000)	223.000.000	71.482.000
35	KECAMATAN SEDAN	-	(37.800.000)	(67.000.000)	(104.800.000)
36	KECAMATAN SARANG	-	163.912.000	32.000.000	195.912.000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN	-	(335.422.000)	(58.030.000)	(393.452.000)
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	-	40.546.000	90.000.000	130.546.000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	(12.000.000)	(128.352.000)	(4.929.625.000)	(5.057.977.000)
40	DINAS ESDM	-	(62.203.000)	(150.000.000)	(212.203.000)
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	(111.954.000)	2.019.550.000	1.907.596.000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.310.000.000	39.745.000	(419.000.000)	(379.255.000)
	JUMLAH	(105.973.950.045)	(109.880.374.663)	47.539.425.813	(62.340.948.850)

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	24=16-8	25=17-9	26=18-10	27=25+26
1	DINAS PENDIDIKAN	-	109.001	(275.000.000)	(274.890.999)
2	DINAS KESEHATAN	-	-	6.805.036.759	6.805.036.759
3	RSUD dr R. SOETRASNO	-	-	390.909.976	390.909.976
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	-	215.000.000	215.000.000
5	BAPPEDA	-	-	-	-
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	70.000.000	70.000.000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	640.000.000	640.000.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	165.000.000	165.000.000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	150.000.000	-	-	-
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	-
13	SATPOL PP	-	-	-	-
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	(132.750.000)	-	(132.750.000)
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
17	SETDA	-	-	450.000.000	450.000.000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	-	-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	-	-	-	-
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	-	-
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	-	-
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	150.000.000	150.000.000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	300.000.000	300.000.000
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-
18	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	683.000.000	(602.000.000)	132.750.000	132.750.000
a	(SKPD)	683.000.000	-	-	-
b	(PPKD)	-	(602.000.000)	-	(602.000.000)
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	-	-	-
21	BKD	-	-	-	-
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	-	-	-	-
23	KECAMATAN REMBANG	-	-	100.000.000	100.000.000
24	KECAMATAN KALIORI	-	-	-	-
25	KECAMATAN SULANG	-	-	-	-
26	KECAMATAN SUMBER	-	-	100.000.000	100.000.000
27	KECAMATAN BULU	-	-	-	-
28	KECAMATAN LASEM	-	-	-	-
29	KECAMATAN PANCUR	-	-	-	-
30	KECAMATAN SLUKE	-	-	-	-
31	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-	-
32	KECAMATAN GUNEM	-	-	-	-
33	KECAMATAN SALE	-	-	-	-
34	KECAMATAN KRAGAN	-	-	-	-
35	KECAMATAN SEDAN	-	-	-	-
36	KECAMATAN SARANG	-	-	-	-
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN	-	-	-	-
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	-	-	-	-
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	-	-	(15.000.000)	(15.000.000)
40	DINAS ESDM	-	-	-	-
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-
	JUMLAH	833.000.000	(734.640.999)	8.778.696.735	8.044.055.736

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

NO	SKPD	PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		JUMLAH				
		SEBELUM PERUBAHAN				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7=+3+4+5+6
1	DINAS KESEHATAN		8.026.569.000		25.000.000.000	33.026.569.000
2	RSU R. SOETRASNO				70.000.000.000	70.000.000.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM		2.235.000.000		20.000.000	2.255.000.000
4	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		2.143.864.000			2.143.864.000
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					-
5	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM		2.796.009.000		3.991.000	2.800.000.000
6	SEKRETARIAT DAERAH	-	153.500.000	6.340.000.000	-	6.493.500.000
	Bag. Administrasi Keuangan		90.000.000			90.000.000
	Bag. Administrasi Perekonomian			6.340.000.000		6.340.000.000
	Bag. Kesejahteraan Rakyat		21.000.000			21.000.000
	Bag. Humas		42.500.000			42.500.000
7	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	38.153.500.000	200.000.000	-	13.265.000.000	51.618.500.000
	SKPD	38.153.500.000	200.000.000		13.265.000.000	51.618.500.000
	PPKD					-
8	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN		133.472.000			133.472.000
9	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		1.015.000.000		43.000.000	1.058.000.000
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		11.150.407.500		128.366.000	11.278.773.500
	JUMLAH	38.153.500.000	27.853.821.500	6.340.000.000	108.460.357.000	180.807.678.500

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

NO	SKPD	PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		JUMLAH				
		SETELAH PERUBAHAN				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	8	9	10	11	12=8+9+10+11
1	DINAS KESEHATAN		25.600.000		42.627.034.184	42.652.634.184
2	RSU R. SOETRASNO				80.000.000.000	80.000.000.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM		2.235.000.000		20.000.000	2.255.000.000
4	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		1.704.004.000		3.633.460	1.707.637.460
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					-
5	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM		2.909.387.000		3.991.000	2.913.378.000
6	SEKRETARIAT DAERAH	-	132.500.000	6.564.456.000	-	6.696.956.000
	Bag. Administrasi Keuangan		90.000.000			90.000.000
	Bag. Administrasi Perekonomian			6.564.456.000		6.564.456.000
	Bag. Kesejahteraan Rakyat		-			-
	Bag. Humas		42.500.000			42.500.000
7	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	41.678.500.000	200.000.000	-	25.091.577.000	66.970.077.000
	SKPD	41.678.500.000	200.000.000		25.091.577.000	66.970.077.000
	PPKD					-
8	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN		121.472.000			121.472.000
9	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		1.015.000.000		43.000.000	1.058.000.000
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		12.400.407.500		188.366.000	12.588.773.500
	JUMLAH	41.678.500.000	20.743.370.500	6.564.456.000	147.977.601.644	216.963.928.144

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

NO	SKPD	PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		JUMLAH				
		BERTAMBAH(BERKURANG)				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	13=8-3	14=9-4	15=10-5	16=11-6	17=13+14+15+16
1	DINAS KESEHATAN	-	(8.000.969.000)	-	17.627.034.184	9.626.065.184
2	RSU R. SOETRASNO	-	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	-	-	-	-
4	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	(439.860.000)	-	3.633.460	(436.226.540)
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-
5	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	-	113.378.000	-	-	113.378.000
6	SEKRETARIAT DAERAH	-	(21.000.000)	224.456.000	-	203.456.000
	Bag. Administrasi Keuangan	-	-	-	-	-
	Bag. Administrasi Perekonomian	-	-	224.456.000	-	224.456.000
	Bag. Kesejahteraan Rakyat	-	(21.000.000)	-	-	(21.000.000)
	Bag. Humas	-	-	-	-	-
7	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.525.000.000	-	-	11.826.577.000	15.351.577.000
	SKPD	3.525.000.000	-	-	11.826.577.000	15.351.577.000
	PPKD	-	-	-	-	-
8	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	-	(12.000.000)	-	-	(12.000.000)
9	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	1.250.000.000	-	60.000.000	1.310.000.000
						-
	JUMLAH	3.525.000.000	(7.110.451.000)	224.456.000	39.517.244.644	36.156.249.644

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

NO	SKPD	PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		PEMBAHASAN				
		PERSETUJUAN				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	18	19	20	21	22=18+19+20+21
1	DINAS KESEHATAN		25.600.000		42.627.034.184	42.652.634.184
2	RSU R. SOETRASNO				80.000.000.000	80.000.000.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM		2.235.000.000		20.000.000	2.255.000.000
4	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		1.704.004.000		3.633.460	1.707.637.460
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					-
5	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM		3.059.387.000		3.991.000	3.063.378.000
6	SEKRETARIAT DAERAH	-	132.500.000	6.564.456.000	-	6.696.956.000
	Bag. Administrasi Keuangan		90.000.000			90.000.000
	Bag. Administrasi Perekonomian			6.564.456.000		6.564.456.000
	Bag. Kesejahteraan Rakyat		-			-
	Bag. Humas		42.500.000			42.500.000
7	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	41.678.500.000	200.000.000	-	25.774.577.000	67.653.077.000
	SKPD	41.678.500.000	200.000.000		25.774.577.000	67.653.077.000
	PPKD					-
8	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN		121.472.000			121.472.000
9	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		1.015.000.000		43.000.000	1.058.000.000
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		12.400.407.500		188.366.000	12.588.773.500
	JUMLAH	41.678.500.000	20.893.370.500	6.564.456.000	148.660.601.644	217.796.928.144

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

NO	SKPD	PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		PEMBAHASAN				
		BERTAMBAH(BERKURANG)				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	23=18-3	24=19-4	25=20-5	26=21-6	27=23+24+25+26
1	DINAS KESEHATAN	-	(8.000.969.000)	-	17.627.034.184	9.626.065.184
2	RSU R. SOETRASNO	-	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	-	-	-	-
4	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	(439.860.000)	-	3.633.460	(436.226.540)
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-
5	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	-	263.378.000	-	-	263.378.000
6	SEKRETARIAT DAERAH	-	(21.000.000)	224.456.000	-	203.456.000
	Bag. Administrasi Keuangan	-	-	-	-	-
	Bag. Administrasi Perekonomian	-	-	224.456.000	-	224.456.000
	Bag. Kesejahteraan Rakyat	-	(21.000.000)	-	-	(21.000.000)
	Bag. Humas	-	-	-	-	-
7	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.525.000.000	-	-	12.509.577.000	16.034.577.000
	SKPD	3.525.000.000	-	-	12.509.577.000	16.034.577.000
	PPKD	-	-	-	-	-
8	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	-	(12.000.000)	-	-	(12.000.000)
9	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	1.250.000.000	-	60.000.000	1.310.000.000
	JUMLAH	3.525.000.000	(6.960.451.000)	224.456.000	40.200.244.644	36.989.249.644

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

NO	SKPD	PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		PEMBAHASAN				
		BERTAMBAH(BERKURANG)				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	28=18-8	29=19-9	30=20-10	31=21-11	32
1	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-
2	RSU R. SOETRASNO	-	-	-	-	-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	-	-	-	-
4	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-
5	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	-	150.000.000	-	-	150.000.000
6	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-
	Bag. Administrasi Keuangan	-	-	-	-	-
	Bag. Administrasi Perekonomian	-	-	-	-	-
	Bag. Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-
	Bag. Humas	-	-	-	-	-
7	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	683.000.000	683.000.000
	SKPD	-	-	-	683.000.000	683.000.000
	PPKD	-	-	-	-	-
8	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	-	-	-	-	-
9	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	150.000.000	-	683.000.000	833.000.000

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	JUMLAH (Rp)							
		SEBELUM PERUBAHAN							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3+4+5+6+7+8+9
1	DINAS PENDIDIKAN	575.387.143.000							575.387.143.000
2	DINAS KESEHATAN	40.992.314.000							40.992.314.000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	25.066.055.000							25.066.055.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	14.979.035.000							14.979.035.000
5	BAPPEDA	3.538.165.000							3.538.165.000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.867.437.000							5.867.437.000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	2.707.932.000							2.707.932.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL	3.006.935.000							3.006.935.000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	9.576.217.000							9.576.217.000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.586.256.000							5.586.256.000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	9.490.304.000							9.490.304.000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.540.569.000							1.540.569.000
13	SATPOL PP	3.551.407.000							3.551.407.000
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.176.828.000							2.176.828.000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	8.986.081.000							8.986.081.000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	749.821.000							749.821.000
17	SETDA	13.768.098.000							13.768.098.000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)								-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)								-
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	13.768.098.000							13.768.098.000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)								-
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)								-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)								-
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)								-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)								-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)								-
18	SEKRETARIAT DPRD	3.857.961.000							3.857.961.000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12.360.846.000	37.000.000	6.455.961.000	8.237.928.000	6.470.000.000	320.058.833.000	1.000.000.000	354.620.568.000
a	(SKPD)	12.360.846.000							12.360.846.000
b	(PPKD)		37.000.000	6.455.961.000	8.237.928.000	6.470.000.000	320.058.833.000	1.000.000.000	342.259.722.000
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	3.559.470.000							3.559.470.000
21	BKD	3.612.976.000							3.612.976.000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	1.456.104.000							1.456.104.000
23	KECAMATAN REMBANG	5.557.777.000							5.557.777.000
24	KECAMATAN KALIORI	2.212.168.000							2.212.168.000
25	KECAMATAN SULANG	1.813.473.000							1.813.473.000
26	KECAMATAN SUMBER	1.881.138.000							1.881.138.000
27	KECAMATAN BULU	1.629.590.000							1.629.590.000
28	KECAMATAN LASEM	2.096.173.000							2.096.173.000
29	KECAMATAN PANCUR	2.222.979.000							2.222.979.000
30	KECAMATAN SLUKE	1.724.912.000							1.724.912.000
31	KECAMATAN PAMOTAN	1.716.400.000							1.716.400.000
32	KECAMATAN GUNEM	1.708.365.000							1.708.365.000
33	KECAMATAN SALE	1.620.884.000							1.620.884.000
34	KECAMATAN KRAGAN	2.158.113.000							2.158.113.000
35	KECAMATAN SEDAN	1.872.280.000							1.872.280.000
36	KECAMATAN SARANG	1.989.290.000							1.989.290.000
37	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	8.776.994.000							8.776.994.000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	2.020.180.000							2.020.180.000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	6.596.795.000							6.596.795.000
40	DINAS ESDM	2.468.148.000							2.468.148.000
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.766.281.000							2.766.281.000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.304.707.000							4.304.707.000
	JUMLAH	808.954.601.000	37.000.000	6.455.961.000	8.237.928.000	6.470.000.000	320.058.833.000	1.000.000.000	1.151.214.323.000

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGS

NO.	ORGANISASI	JUMLAH (Rp)							
		SETELAH PERUBAHAN							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18 = 11+12+13+14+15+16+17
1	DINAS PENDIDIKAN	475.181.543.836							475.181.543.836
2	DINAS KESEHATAN	40.185.359.000							40.185.359.000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	24.627.248.000							24.627.248.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	14.878.425.000							14.878.425.000
5	BAPPEDA	3.505.652.000							3.505.652.000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.743.451.000							5.743.451.000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	2.782.101.000							2.782.101.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	3.007.752.000							3.007.752.000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	9.115.144.000							9.115.144.000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.371.793.000							5.371.793.000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	9.335.584.000							9.335.584.000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.545.620.000							1.545.620.000
13	SATPOL PP	3.543.615.000							3.543.615.000
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.179.310.000							2.179.310.000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	10.350.313.000							10.350.313.000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	801.590.000							801.590.000
17	SETDA	13.439.930.000							13.439.930.000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)								-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)								-
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	13.439.930.000							13.439.930.000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)								-
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)								-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)								-
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)								-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)								-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)								-
18	SEKRETARIAT DPRD	3.880.993.000							3.880.993.000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11.598.546.000	37.000.000	6.455.961.000	31.383.060.500	7.330.000.000	290.387.430.000	769.375.000	347.961.372.500
a	(SKPD)	11.598.546.000							11.598.546.000
b	(PPKD)		37.000.000	6.455.961.000	31.383.060.500	7.330.000.000	290.387.430.000	769.375.000	336.362.826.500
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	3.390.197.000							3.390.197.000
21	BKD	3.723.486.000							3.723.486.000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	1.518.791.000							1.518.791.000
23	KECAMATAN REMBANG	5.390.741.000							5.390.741.000
24	KECAMATAN KALIORI	2.134.119.000							2.134.119.000
25	KECAMATAN SULANG	1.848.738.000							1.848.738.000
26	KECAMATAN SUMBER	1.774.267.000							1.774.267.000
27	KECAMATAN BULU	1.708.716.000							1.708.716.000
28	KECAMATAN LASEM	2.018.964.000							2.018.964.000
29	KECAMATAN PANCUR	2.169.164.000							2.169.164.000
30	KECAMATAN SLUKE	1.574.618.000							1.574.618.000
31	KECAMATAN PAMOTAN	1.686.489.000							1.686.489.000
32	KECAMATAN GUNEM	1.717.082.000							1.717.082.000
33	KECAMATAN SALE	1.606.679.000							1.606.679.000
34	KECAMATAN KRAGAN	2.006.595.000							2.006.595.000
35	KECAMATAN SEDAN	1.834.480.000							1.834.480.000
36	KECAMATAN SARANG	2.153.202.000							2.153.202.000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN	8.441.572.000							8.441.572.000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	2.060.726.000							2.060.726.000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	6.468.443.000							6.468.443.000
40	DINAS ESDM	2.405.945.000							2.405.945.000
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.654.327.000							2.654.327.000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.344.452.000							4.344.452.000
	JUMLAH	705.705.762.836	37.000.000	6.455.961.000	31.383.060.500	7.330.000.000	290.387.430.000	769.375.000	1.042.068.589.336

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	BERTAMBAH (BERKURANG)							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	19 = 11-3	20 = 12-4	21 = 13-5	22 = 14-6	23 = 15-7	24 = 16-8	25 = 17-9	26=19+20+21+22+23+24+25
1	DINAS PENDIDIKAN	(100.205.599.164)	-	-	-	-	-	-	(100.205.599.164)
2	DINAS KESEHATAN	(806.955.000)	-	-	-	-	-	-	(806.955.000)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	(438.807.000)	-	-	-	-	-	-	(438.807.000)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	(100.610.000)	-	-	-	-	-	-	(100.610.000)
5	BAPPEDA	(32.513.000)	-	-	-	-	-	-	(32.513.000)
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(123.986.000)	-	-	-	-	-	-	(123.986.000)
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	74.169.000	-	-	-	-	-	-	74.169.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	817.000	-	-	-	-	-	-	817.000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(461.073.000)	-	-	-	-	-	-	(461.073.000)
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(214.463.000)	-	-	-	-	-	-	(214.463.000)
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	(154.720.000)	-	-	-	-	-	-	(154.720.000)
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5.051.000	-	-	-	-	-	-	5.051.000
13	SATPOL PP	(7.792.000)	-	-	-	-	-	-	(7.792.000)
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.482.000	-	-	-	-	-	-	2.482.000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1.364.232.000	-	-	-	-	-	-	1.364.232.000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	51.769.000	-	-	-	-	-	-	51.769.000
17	SETDA	(328.168.000)	-	-	-	-	-	-	(328.168.000)
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	-	-	-	-	-	-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	(328.168.000)	-	-	-	-	-	-	(328.168.000)
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SEKRETARIAT DPRD	23.032.000	-	-	-	-	-	-	23.032.000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(762.300.000)	-	-	23.145.132.500	860.000.000	(29.671.403.000)	(230.625.000)	(6.659.195.500)
a	(SKPD)	(762.300.000)	-	-	-	-	-	-	(762.300.000)
b	(PPKD)	-	-	-	23.145.132.500	860.000.000	(29.671.403.000)	(230.625.000)	(5.896.895.500)
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	(169.273.000)	-	-	-	-	-	-	(169.273.000)
21	BKD	110.510.000	-	-	-	-	-	-	110.510.000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	62.687.000	-	-	-	-	-	-	62.687.000
23	KECAMATAN REMBANG	(167.036.000)	-	-	-	-	-	-	(167.036.000)
24	KECAMATAN KALIORI	(78.049.000)	-	-	-	-	-	-	(78.049.000)
25	KECAMATAN SULANG	35.265.000	-	-	-	-	-	-	35.265.000
26	KECAMATAN SUMBER	(106.871.000)	-	-	-	-	-	-	(106.871.000)
27	KECAMATAN BULU	79.126.000	-	-	-	-	-	-	79.126.000
28	KECAMATAN LASEM	(77.209.000)	-	-	-	-	-	-	(77.209.000)
29	KECAMATAN PANCUR	(53.815.000)	-	-	-	-	-	-	(53.815.000)
30	KECAMATAN SLUKE	(150.294.000)	-	-	-	-	-	-	(150.294.000)
31	KECAMATAN PAMOTAN	(29.911.000)	-	-	-	-	-	-	(29.911.000)
32	KECAMATAN GUNEM	8.717.000	-	-	-	-	-	-	8.717.000
33	KECAMATAN SALE	(14.205.000)	-	-	-	-	-	-	(14.205.000)
34	KECAMATAN KRAGAN	(151.518.000)	-	-	-	-	-	-	(151.518.000)
35	KECAMATAN SEDAN	(37.800.000)	-	-	-	-	-	-	(37.800.000)
36	KECAMATAN SARANG	163.912.000	-	-	-	-	-	-	163.912.000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN	(335.422.000)	-	-	-	-	-	-	(335.422.000)
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	40.546.000	-	-	-	-	-	-	40.546.000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	(128.352.000)	-	-	-	-	-	-	(128.352.000)
40	DINAS ESDM	(62.203.000)	-	-	-	-	-	-	(62.203.000)
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	(111.954.000)	-	-	-	-	-	-	(111.954.000)
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	39.745.000	-	-	-	-	-	-	39.745.000
	JUMLAH	(103.248.838.164)	-	-	23.145.132.500	860.000.000	(29.671.403.000)	(230.625.000)	(109.145.733.664)

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	PEMBAHASAN							
		PERSETUJUAN							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34 = 27+28+29+30+31+32+33
1	DINAS PENDIDIKAN	475.181.652.837							475.181.652.837
2	DINAS KESEHATAN	40.185.359.000							40.185.359.000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	24.627.248.000							24.627.248.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	14.878.425.000							14.878.425.000
5	BAPPEDA	3.505.652.000							3.505.652.000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.743.451.000							5.743.451.000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	2.782.101.000							2.782.101.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.007.752.000							3.007.752.000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	9.115.144.000							9.115.144.000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.371.793.000							5.371.793.000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	9.335.584.000							9.335.584.000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.545.620.000							1.545.620.000
13	SATPOL PP	3.543.615.000							3.543.615.000
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.179.310.000							2.179.310.000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	10.217.563.000							10.217.563.000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	801.590.000							801.590.000
17	SETDA	13.439.930.000	-			-	-	-	13.439.930.000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)								-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)								-
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	13.439.930.000							13.439.930.000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)								-
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)								-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)								-
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)								-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)								-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)								-
18	SEKRETARIAT DPRD	3.880.993.000							3.880.993.000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11.598.546.000	37.000.000	6.455.961.000	29.947.605.500	7.700.000.000	290.850.885.000	769.375.000	347.359.372.500
a	(SKPD)	11.598.546.000							11.598.546.000
b	(PPKD)		37.000.000	6.455.961.000	29.947.605.500	7.700.000.000	290.850.885.000	769.375.000	335.760.826.500
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	3.390.197.000							3.390.197.000
21	BKD	3.723.486.000							3.723.486.000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	1.518.791.000							1.518.791.000
23	KECAMATAN REMBANG	5.390.741.000							5.390.741.000
24	KECAMATAN KALIORI	2.134.119.000							2.134.119.000
25	KECAMATAN SULANG	1.848.738.000							1.848.738.000
26	KECAMATAN SUMBER	1.774.267.000							1.774.267.000
27	KECAMATAN BULU	1.708.716.000							1.708.716.000
28	KECAMATAN LASEM	2.018.964.000							2.018.964.000
29	KECAMATAN PANCUR	2.169.164.000							2.169.164.000
30	KECAMATAN SLUKE	1.574.618.000							1.574.618.000
31	KECAMATAN PAMOTAN	1.686.489.000							1.686.489.000
32	KECAMATAN GUNEM	1.717.082.000							1.717.082.000
33	KECAMATAN SALE	1.606.679.000							1.606.679.000
34	KECAMATAN KRAGAN	2.006.595.000							2.006.595.000
35	KECAMATAN SEDAN	1.834.480.000							1.834.480.000
36	KECAMATAN SARANG	2.153.202.000							2.153.202.000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN	8.441.572.000							8.441.572.000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	2.060.726.000							2.060.726.000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	6.468.443.000							6.468.443.000
40	DINAS ESDM	2.405.945.000							2.405.945.000
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.654.327.000							2.654.327.000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.344.452.000							4.344.452.000
	JUMLAH	705.573.121.837	37.000.000	6.455.961.000	29.947.605.500	7.700.000.000	290.850.885.000	769.375.000	1.041.333.948.337

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGS

NO.	ORGANISASI	PEMBAHASAN							
		BERTAMBAH (BERKURANG)							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	35 = 27-3	36 = 28-4	37 = 29-5	38 = 30-6	39 = 31-7	40 = 32-8	41 = 33-9	42 = 35+36+37+38+39+40+41
1	DINAS PENDIDIKAN	(100.205.490.163)	-	-	-	-	-	-	(100.205.490.163)
2	DINAS KESEHATAN	(806.955.000)	-	-	-	-	-	-	(806.955.000)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	(438.807.000)	-	-	-	-	-	-	(438.807.000)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	(100.610.000)	-	-	-	-	-	-	(100.610.000)
5	BAPPEDA	(32.513.000)	-	-	-	-	-	-	(32.513.000)
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(123.986.000)	-	-	-	-	-	-	(123.986.000)
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	74.169.000	-	-	-	-	-	-	74.169.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	817.000	-	-	-	-	-	-	817.000
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(461.073.000)	-	-	-	-	-	-	(461.073.000)
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(214.463.000)	-	-	-	-	-	-	(214.463.000)
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	(154.720.000)	-	-	-	-	-	-	(154.720.000)
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5.051.000	-	-	-	-	-	-	5.051.000
13	SATPOL PP	(7.792.000)	-	-	-	-	-	-	(7.792.000)
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.482.000	-	-	-	-	-	-	2.482.000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1.231.482.000	-	-	-	-	-	-	1.231.482.000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	51.769.000	-	-	-	-	-	-	51.769.000
17	SETDA	(328.168.000)	-	-	-	-	-	-	(328.168.000)
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	-	-	-	-	-	-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	(328.168.000)	-	-	-	-	-	-	(328.168.000)
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SEKRETARIAT DPRD	23.032.000	-	-	-	-	-	-	23.032.000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(762.300.000)	-	-	21.709.677.500	1.230.000.000	(29.207.948.000)	(230.625.000)	(7.261.195.500)
a	(SKPD)	(762.300.000)	-	-	-	-	-	-	(762.300.000)
b	(PPKD)	-	-	-	21.709.677.500	1.230.000.000	(29.207.948.000)	(230.625.000)	(6.498.895.500)
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	(169.273.000)	-	-	-	-	-	-	(169.273.000)
21	BKD	110.510.000	-	-	-	-	-	-	110.510.000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	62.687.000	-	-	-	-	-	-	62.687.000
23	KECAMATAN REMBANG	(167.036.000)	-	-	-	-	-	-	(167.036.000)
24	KECAMATAN KALIORI	(78.049.000)	-	-	-	-	-	-	(78.049.000)
25	KECAMATAN SULANG	35.265.000	-	-	-	-	-	-	35.265.000
26	KECAMATAN SUMBER	(106.871.000)	-	-	-	-	-	-	(106.871.000)
27	KECAMATAN BULU	79.126.000	-	-	-	-	-	-	79.126.000
28	KECAMATAN LASEM	(77.209.000)	-	-	-	-	-	-	(77.209.000)
29	KECAMATAN PANCUR	(53.815.000)	-	-	-	-	-	-	(53.815.000)
30	KECAMATAN SLUKE	(150.294.000)	-	-	-	-	-	-	(150.294.000)
31	KECAMATAN PAMOTAN	(29.911.000)	-	-	-	-	-	-	(29.911.000)
32	KECAMATAN GUNEM	8.717.000	-	-	-	-	-	-	8.717.000
33	KECAMATAN SALE	(14.205.000)	-	-	-	-	-	-	(14.205.000)
34	KECAMATAN KRAGAN	(151.518.000)	-	-	-	-	-	-	(151.518.000)
35	KECAMATAN SEDAN	(37.800.000)	-	-	-	-	-	-	(37.800.000)
36	KECAMATAN SARANG	163.912.000	-	-	-	-	-	-	163.912.000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN	(335.422.000)	-	-	-	-	-	-	(335.422.000)
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	40.546.000	-	-	-	-	-	-	40.546.000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	(128.352.000)	-	-	-	-	-	-	(128.352.000)
40	DINAS ESDM	(62.203.000)	-	-	-	-	-	-	(62.203.000)
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	(111.954.000)	-	-	-	-	-	-	(111.954.000)
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	39.745.000	-	-	-	-	-	-	39.745.000
	JUMLAH	(103.381.479.163)	-	-	21.709.677.500	1.230.000.000	(29.207.948.000)	(230.625.000)	(109.880.374.663)

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGE

NO.	ORGANISASI	HASIL PEMBAHASAN							
		BERTAMBAH (BERKURANG)							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupat en/Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	43 = 27-11	44 = 28-12	45 = 29-13	46 = 30-14	47 = 31-15	48 = 32-16	49 = 33-17	50 = 43+44+45+46+47+48 +49
1	DINAS PENDIDIKAN	109.001	-	-	-	-	-	-	109.001
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RSUD dr R. SOETRASNO	-	-	-	-	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BAPPEDA	-	-	-	-	-	-	-	-
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	-
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	-	-	-	-	-	-	-	-
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	-	-	-	-	-	-	-	-
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SATPOL PP	-	-	-	-	-	-	-	-
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	(132.750.000)	-	-	-	-	-	-	(132.750.000)
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SETDA	-	-	-	-	-	-	-	-
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	-	-	-	-	-	-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	(1.435.455.000)	370.000.000	463.455.000	-	(602.000.000)
a	(SKPD)	-	-	-	-	-	-	-	-
b	(PPKD)	-	-	-	(1.435.455.000)	370.000.000	463.455.000	-	(602.000.000)
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	-	-	-	-	-	-	-
21	BKD	-	-	-	-	-	-	-	-
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	-	-	-	-	-	-	-	-
23	KECAMATAN REMBANG	-	-	-	-	-	-	-	-
24	KECAMATAN KALIORI	-	-	-	-	-	-	-	-
25	KECAMATAN SULANG	-	-	-	-	-	-	-	-
26	KECAMATAN SUMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
27	KECAMATAN BULU	-	-	-	-	-	-	-	-
28	KECAMATAN LASEM	-	-	-	-	-	-	-	-
29	KECAMATAN PANCUR	-	-	-	-	-	-	-	-
30	KECAMATAN SLUKE	-	-	-	-	-	-	-	-
31	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-	-	-	-	-	-
32	KECAMATAN GUNEM	-	-	-	-	-	-	-	-
33	KECAMATAN SALE	-	-	-	-	-	-	-	-
34	KECAMATAN KRAGAN	-	-	-	-	-	-	-	-
35	KECAMATAN SEDAN	-	-	-	-	-	-	-	-
36	KECAMATAN SARANG	-	-	-	-	-	-	-	-
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN	-	-	-	-	-	-	-	-
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	-	-	-	-	-	-	-	-
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	-	-	-	-	-	-	-	-
40	DINAS ESDM	-	-	-	-	-	-	-	-
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	(132.640.999)	-	-	(1.435.455.000)	370.000.000	463.455.000	-	(734.640.999)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	23 = 15-7	24 = 16-8	25 = 17-9	26 = 23+24+25
1	DINAS PENDIDIKAN	(10.070.000)	169.450.000	(434.380.000)	(275.000.000)
2	DINAS KESEHATAN	1.943.266.023	3.505.429.736	1.356.341.000	6.805.036.759
3	RSUD dr R. SOETRASNO	390.909.976	-	-	390.909.976
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	49.399.600	277.600.400	(112.000.000)	215.000.000
5	BAPPEDA	7.700.000	(7.700.000)	-	-
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.500.000	54.297.750	13.202.250	70.000.000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	(4.100.000)	(900.000)	645.000.000	640.000.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(76.930.000)	23.360.000	53.570.000	-
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	20.900.000	(141.815.000)	285.915.000	165.000.000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	-	-	-	-
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	-
13	SATPOL PP	-	-	-	-
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
17	SETDA	113.700.000	320.300.000	16.000.000	450.000.000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	16.150.000	(13.650.000)	(2.500.000)	-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	-	-	-	-
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	6.500.000	(6.500.000)	-
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	2.650.000	122.350.000	25.000.000	150.000.000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	94.900.000	205.100.000	-	300.000.000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	-	-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-
18	SEKRETARIAT DPRD	(15.550.000)	148.300.000	-	132.750.000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-
a	(SKPD)	-	-	-	-
b	(PPKD)	-	-	-	-
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	6.250.000	(6.250.000)	-	-
21	BKD	(108.400.000)	72.400.000	36.000.000	-
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	(150.000)	(344.000)	494.000	-
23	KECAMATAN REMBANG	-	-	100.000.000	100.000.000
24	KECAMATAN KALIORI	-	-	-	-
25	KECAMATAN SULANG	-	-	100.000.000	100.000.000
26	KECAMATAN SUMBER	-	-	-	-
27	KECAMATAN BULU	-	-	-	-
28	KECAMATAN LASEM	-	-	-	-
29	KECAMATAN PANCUR	-	-	-	-
30	KECAMATAN SLUKE	-	-	-	-
31	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-	-
32	KECAMATAN GUNEM	-	-	-	-
33	KECAMATAN SALE	-	-	-	-
34	KECAMATAN KRAGAN	-	-	-	-
35	KECAMATAN SEDAN	-	-	-	-
36	KECAMATAN SARANG	-	-	-	-
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN	-	-	-	-
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	-	-	-	-
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	23.300.000	(38.300.000)	-	(15.000.000)
40	DINAS ESDM	-	-	-	-
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	950.000	7.850.000	(8.800.000)	-
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(1.500.000)	11.820.000	(10.320.000)	-
	JUMLAH	2.342.175.599	4.395.498.886	2.041.022.250	8.778.696.735

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	19 = 15-3	20 = 16-4	21 = 17-5	22 = 19+20+21
1	DINAS PENDIDIKAN	2.336.044.000	3.059.934.900	8.964.398.100	14.360.377.000
2	DINAS KESEHATAN	2.605.392.873	8.043.261.686	3.353.856.746	14.002.511.305
3	RSUD dr R. SOETRASNO	8.104.123.976	(269.184.000)	3.275.970.000	11.110.909.976
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	678.561.600	(16.269.754.200)	14.036.185.600	(1.555.007.000)
5	BAPPEDA	(73.300.000)	1.949.150.000	49.150.000	1.925.000.000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	84.500.000	550.381.750	(10.276.750)	624.605.000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	20.720.000	43.280.000	747.000.000	811.000.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(66.252.000)	(160.659.500)	176.911.500	(50.000.000)
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	114.165.000	1.138.010.690	424.429.310	1.676.605.000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(21.594.000)	102.394.000	30.370.000	111.170.000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	(106.725.000)	(322.324.000)	5.187.700.000	4.758.651.000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	929.825.000	302.183.000	(14.417.000)	1.217.591.000
13	SATPOL PP	(61.140.000)	41.700.000	(358.179.000)	(377.619.000)
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	86.075.000	(2.170.171.000)	(421.000.000)	(2.505.096.000)
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
17	SETDA	1.201.125.000	2.165.988.700	505.086.300	3.872.200.000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	763.100.000	749.600.000	69.600.000	1.582.300.000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	6.900.000	(241.061.500)	(838.500)	(235.000.000)
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	10.300.000	853.400.000	6.300.000	870.000.000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	47.250.000	378.150.000	358.500.000	783.900.000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	(54.150.000)	56.819.200	(2.669.200)	-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	(45.700.000)	162.850.000	3.850.000	121.000.000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	494.125.000	250.625.000	5.250.000	750.000.000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	(12.000.000)	8.675.000	3.325.000	-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	(8.700.000)	(53.069.000)	61.769.000	-
18	SEKRETARIAT DPRD	(300.195.000)	(1.594.258.000)	317.672.000	(1.576.781.000)
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	358.450.000	157.564.000	(104.692.468)	411.321.532
a	(SKPD)	358.450.000	157.564.000	(104.692.468)	411.321.532
b	(PPKD)	-	-	-	-
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	47.190.000	98.310.000	104.500.000	250.000.000
21	BKD	52.205.000	(294.372.000)	439.550.000	197.383.000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	(19.700.000)	(40.300.000)	-	(60.000.000)
23	KECAMATAN REMBANG	49.204.000	96.570.000	507.730.000	653.504.000
24	KECAMATAN KALIORI	3.320.000	(57.120.000)	88.700.000	34.900.000
25	KECAMATAN SULANG	(34.600.000)	6.250.000	616.850.000	588.500.000
26	KECAMATAN SUMBER	1.550.000	25.450.000	-	27.000.000
27	KECAMATAN BULU	5.410.000	19.790.000	58.800.000	84.000.000
28	KECAMATAN LASEM	(6.970.000)	(173.030.000)	206.000.000	26.000.000
29	KECAMATAN PANCUR	(21.280.000)	51.270.000	(990.000)	29.000.000
30	KECAMATAN SLUKE	(6.400.000)	9.800.000	13.600.000	17.000.000
31	KECAMATAN PAMOTAN	(8.215.000)	10.615.000	35.600.000	38.000.000
32	KECAMATAN GUNEM	(50.225.000)	(129.015.000)	199.850.000	20.610.000
33	KECAMATAN SALE	(3.070.000)	(21.735.000)	100.000.000	75.195.000
34	KECAMATAN KRAGAN	(113.384.000)	(178.616.000)	515.000.000	223.000.000
35	KECAMATAN SEDAN	10.300.000	23.200.000	(100.500.000)	(67.000.000)
36	KECAMATAN SARANG	(24.700.000)	16.700.000	40.000.000	32.000.000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN	9.500.000	68.980.000	(136.510.000)	(58.030.000)
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	5.670.000	(115.670.050)	200.000.050	90.000.000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	153.225.000	(4.991.765.000)	(91.085.000)	(4.929.625.000)
40	DINAS ESDM	18.550.000	(162.550.000)	(6.000.000)	(150.000.000)
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	66.849.500	(97.724.500)	2.050.425.000	2.019.550.000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	52.100.000	(586.080.000)	114.980.000	(419.000.000)
	JUMLAH	16.076.305.949	(9.653.544.524)	41.116.664.388	47.539.425.813

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		PERSETUJUAN			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	15	16	17	18 = 15+16+17
1	DINAS PENDIDIKAN	10.759.341.000	15.457.971.500	70.606.023.200	96.823.335.700
2	DINAS KESEHATAN	30.478.620.673	39.155.869.272	54.568.471.200	124.202.961.145
3	RSUD dr R. SOETRASNO	43.389.478.976	33.714.461.000	25.426.012.376	102.529.952.352
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	5.643.910.600	9.361.966.300	190.742.023.148	205.747.900.048
5	BAPPEDA	2.972.782.000	6.349.500.000	193.150.000	9.515.432.000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.551.700.000	2.982.256.750	766.514.250	5.300.471.000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	584.710.000	1.040.527.000	2.629.253.000	4.254.490.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.134.078.000	1.301.676.300	551.887.500	2.987.641.800
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	2.858.744.000	6.557.908.000	2.276.769.310	11.693.421.310
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.871.889.000	4.339.157.500	1.498.751.500	7.709.798.000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	1.821.268.000	3.163.565.749	21.867.184.000	26.852.017.749
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2.997.910.000	2.174.650.000	35.500.000	5.208.060.000
13	SATPOL PP	1.358.215.000	1.169.692.000	4.221.191.000	6.749.098.000
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	920.000.000	2.061.504.000	510.400.000	3.491.904.000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
17	SETDA	17.693.970.000	16.011.087.200	6.852.582.800	40.557.640.000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	10.220.900.000	2.694.800.000	91.600.000	13.007.300.000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	264.250.000	472.300.000	26.650.000	763.200.000
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	1.529.600.000	3.779.434.000	22.566.000	5.331.600.000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	365.125.000	3.398.983.000	6.409.792.000	10.173.900.000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	335.300.000	1.218.309.200	96.530.800	1.650.140.000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	1.453.515.000	2.117.485.000	25.000.000	3.596.000.000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	1.261.225.000	925.975.000	33.300.000	2.220.500.000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	774.405.000	972.720.000	67.875.000	1.815.000.000
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	1.489.650.000	431.081.000	79.269.000	2.000.000.000
18	SEKRETARIAT DPRD	3.098.968.000	16.041.376.000	406.446.000	19.546.790.000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.345.428.000	7.413.657.000	3.245.857.532	16.004.942.532
a	(SKPD)	5.345.428.000	7.413.657.000	3.245.857.532	16.004.942.532
b	(PPKD)				
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	4.017.550.000	1.795.740.000	495.300.000	6.308.590.000
21	BKD	2.347.100.000	4.332.295.000	639.050.000	7.318.445.000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	453.705.000	705.185.000	263.630.000	1.422.520.000
23	KECAMATAN REMBANG	641.040.000	805.329.000	2.082.015.000	3.528.384.000
24	KECAMATAN KALIORI	144.246.000	369.258.000	263.700.000	777.204.000
25	KECAMATAN SULANG	287.639.000	422.655.000	674.850.000	1.385.144.000
26	KECAMATAN SUMBER	178.770.000	430.335.000	110.995.000	720.100.000
27	KECAMATAN BULU	176.435.000	272.925.000	398.200.000	847.560.000
28	KECAMATAN LASEM	177.444.000	268.740.000	329.920.000	776.104.000
29	KECAMATAN PANCUR	185.420.000	333.170.000	240.010.000	758.600.000
30	KECAMATAN SLUKE	187.046.000	258.454.000	291.100.000	736.600.000
31	KECAMATAN PAMOTAN	267.130.000	356.730.000	172.500.000	796.360.000
32	KECAMATAN GUNEM	198.407.000	272.213.000	310.350.000	780.970.000
33	KECAMATAN SALE	272.635.000	364.290.000	195.000.000	831.925.000
34	KECAMATAN KRAGAN	186.229.000	478.184.000	645.213.000	1.309.626.000
35	KECAMATAN SEDAN	275.350.000	284.670.000	132.200.000	692.220.000
36	KECAMATAN SARANG	175.450.000	343.450.000	362.500.000	881.400.000
37	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN	1.157.503.000	2.739.647.200	2.269.047.800	6.166.198.000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	361.380.000	1.145.199.950	796.700.050	2.303.280.000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	2.583.019.000	43.749.456.000	3.616.835.472	49.949.310.472
40	DINAS ESDM	501.238.000	11.330.477.000	2.711.300.000	14.543.015.000
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.707.765.500	5.380.614.500	6.931.760.000	14.020.140.000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.453.305.000	5.390.669.000	18.668.142.815	27.512.116.815
	JUMLAH	154.416.819.749	250.126.512.221	428.998.335.953	833.541.667.923

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	BERTAMBAH (BERKURANG)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	11 = 7-3	12 = 8-4	13 = 9-5	14 = 11+12+13
1	DINAS PENDIDIKAN	2.346.114.000	2.890.484.900	9.398.778.100	14.635.377.000
2	DINAS KESEHATAN	662.126.850	4.537.831.950	1.997.515.746	7.197.474.546
3	RSUD dr R. SOETRASNO	7.713.214.000	(269.184.000)	3.275.970.000	10.720.000.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	629.162.000	(16.547.354.600)	14.148.185.600	(1.770.007.000)
5	BAPPEDA	(81.000.000)	1.956.850.000	49.150.000	1.925.000.000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	82.000.000	496.084.000	(23.479.000)	554.605.000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	24.820.000	44.180.000	102.000.000	171.000.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.678.000	(184.019.500)	123.341.500	(50.000.000)
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	93.265.000	1.279.825.690	138.514.310	1.511.605.000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(21.594.000)	102.394.000	30.370.000	111.170.000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	(106.725.000)	(322.324.000)	5.187.700.000	4.758.651.000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	929.825.000	302.183.000	(14.417.000)	1.217.591.000
13	SATPOL PP	(61.140.000)	41.700.000	(358.179.000)	(377.619.000)
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	86.075.000	(2.170.171.000)	(421.000.000)	(2.505.096.000)
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
17	SETDA	1.087.425.000	1.845.688.700	489.086.300	3.422.200.000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	746.950.000	763.250.000	72.100.000	1.582.300.000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	6.900.000	(241.061.500)	(838.500)	(235.000.000)
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	10.300.000	853.400.000	6.300.000	870.000.000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	47.250.000	371.650.000	365.000.000	783.900.000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	(54.150.000)	56.819.200	(2.669.200)	-
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	(48.350.000)	40.500.000	(21.150.000)	(29.000.000)
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	399.225.000	45.525.000	5.250.000	450.000.000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	(12.000.000)	8.675.000	3.325.000	-
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	(8.700.000)	(53.069.000)	61.769.000	-
18	SEKRETARIAT DPRD	(284.645.000)	(1.742.558.000)	317.672.000	(1.709.531.000)
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	358.450.000	157.564.000	(104.692.468)	411.321.532
a	(SKPD)	358.450.000	157.564.000	(104.692.468)	411.321.532
b	(PPKD)	-	-	-	-
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	40.940.000	104.560.000	104.500.000	250.000.000
21	BKD	160.605.000	(366.772.000)	403.550.000	197.383.000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	(19.550.000)	(39.956.000)	(494.000)	(60.000.000)
23	KECAMATAN REMBANG	49.204.000	96.570.000	407.730.000	553.504.000
24	KECAMATAN KALIORI	3.320.000	(57.120.000)	88.700.000	34.900.000
25	KECAMATAN SULANG	(34.600.000)	6.250.000	516.850.000	488.500.000
26	KECAMATAN SUMBER	1.550.000	25.450.000	-	27.000.000
27	KECAMATAN BULU	5.410.000	19.790.000	58.800.000	84.000.000
28	KECAMATAN LASEM	(6.970.000)	(173.030.000)	206.000.000	26.000.000
29	KECAMATAN PANCUR	(21.280.000)	51.270.000	(990.000)	29.000.000
30	KECAMATAN SLUKE	(6.400.000)	9.800.000	13.600.000	17.000.000
31	KECAMATAN PAMOTAN	(8.215.000)	10.615.000	35.600.000	38.000.000
32	KECAMATAN GUNEM	(50.225.000)	(129.015.000)	199.850.000	20.610.000
33	KECAMATAN SALE	(3.070.000)	(21.735.000)	100.000.000	75.195.000
34	KECAMATAN KRAGAN	(113.384.000)	(178.616.000)	515.000.000	223.000.000
35	KECAMATAN SEDAN	10.300.000	23.200.000	(100.500.000)	(67.000.000)
36	KECAMATAN SARANG	(24.700.000)	16.700.000	40.000.000	32.000.000
37	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	9.500.000	68.980.000	(136.510.000)	(58.030.000)
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	5.670.000	(115.670.050)	200.000.050	90.000.000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	129.925.000	(4.953.465.000)	(91.085.000)	(4.914.625.000)
40	DINAS ESDM	18.550.000	(162.550.000)	(6.000.000)	(150.000.000)
41	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	65.899.500	(105.574.500)	2.059.225.000	2.019.550.000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	53.600.000	(597.900.000)	125.300.000	(419.000.000)
	JUMLAH	13.734.130.350	(14.049.043.410)	39.075.642.138	38.760.729.078

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	JUMLAH			
		SETELAH PERUBAHAN			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	7	8	9	10 = 7+8+9
1	DINAS PENDIDIKAN	10.769.411.000	15.288.521.500	71.040.403.200	97.098.335.700
2	DINAS KESEHATAN	28.535.354.650	35.650.439.536	53.212.130.200	117.397.924.386
3	RSUD dr R. SOETRASNO	42.998.569.000	33.714.461.000	25.426.012.376	102.139.042.376
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	5.594.511.000	9.084.365.900	190.854.023.148	205.532.900.048
5	BAPPEDA	2.965.082.000	6.357.200.000	193.150.000	9.515.432.000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.549.200.000	2.927.959.000	753.312.000	5.230.471.000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	588.810.000	1.041.427.000	1.984.253.000	3.614.490.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.211.008.000	1.278.316.300	498.317.500	2.987.641.800
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	2.837.844.000	6.699.723.000	1.990.854.310	11.528.421.310
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.871.889.000	4.339.157.500	1.498.751.500	7.709.798.000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	1.821.268.000	3.163.565.749	21.867.184.000	26.852.017.749
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2.997.910.000	2.174.650.000	35.500.000	5.208.060.000
13	SATPOL PP	1.358.215.000	1.169.692.000	4.221.191.000	6.749.098.000
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	920.000.000	2.061.504.000	510.400.000	3.491.904.000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
17	SETDA	17.580.270.000	15.690.787.200	6.836.582.800	40.107.640.000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	10.204.750.000	2.708.450.000	94.100.000	13.007.300.000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	264.250.000	472.300.000	26.650.000	763.200.000
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	1.529.600.000	3.779.434.000	22.566.000	5.331.600.000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	365.125.000	3.392.483.000	6.416.292.000	10.173.900.000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	335.300.000	1.218.309.200	96.530.800	1.650.140.000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	1.450.865.000	1.995.135.000	-	3.446.000.000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	1.166.325.000	720.875.000	33.300.000	1.920.500.000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	774.405.000	972.720.000	67.875.000	1.815.000.000
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	1.489.650.000	431.081.000	79.269.000	2.000.000.000
18	SEKRETARIAT DPRD	3.114.518.000	15.893.076.000	406.446.000	19.414.040.000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.345.428.000	7.413.657.000	3.245.857.532	16.004.942.532
a	(SKPD)	5.345.428.000	7.413.657.000	3.245.857.532	16.004.942.532
b	(PPKD)				-
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	4.011.300.000	1.801.990.000	495.300.000	6.308.590.000
21	BKD	2.455.500.000	4.259.895.000	603.050.000	7.318.445.000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	453.855.000	705.529.000	263.136.000	1.422.520.000
23	KECAMATAN REMBANG	641.040.000	805.329.000	1.982.015.000	3.428.384.000
24	KECAMATAN KALIORI	144.246.000	369.258.000	263.700.000	777.204.000
25	KECAMATAN SULANG	287.639.000	422.655.000	574.850.000	1.285.144.000
26	KECAMATAN SUMBER	178.770.000	430.335.000	110.995.000	720.100.000
27	KECAMATAN BULU	176.435.000	272.925.000	398.200.000	847.560.000
28	KECAMATAN LASEM	177.444.000	268.740.000	329.920.000	776.104.000
29	KECAMATAN PANCUR	185.420.000	333.170.000	240.010.000	758.600.000
30	KECAMATAN SLUKE	187.046.000	258.454.000	291.100.000	736.600.000
31	KECAMATAN PAMOTAN	267.130.000	356.730.000	172.500.000	796.360.000
32	KECAMATAN GUNEM	198.407.000	272.213.000	310.350.000	780.970.000
33	KECAMATAN SALE	272.635.000	364.290.000	195.000.000	831.925.000
34	KECAMATAN KRAGAN	186.229.000	478.184.000	645.213.000	1.309.626.000
35	KECAMATAN SEDAN	275.350.000	284.670.000	132.200.000	692.220.000
36	KECAMATAN SARANG	175.450.000	343.450.000	362.500.000	881.400.000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN	1.157.503.000	2.739.647.200	2.269.047.800	6.166.198.000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	361.380.000	1.145.199.950	796.700.050	2.303.280.000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	2.559.719.000	43.787.756.000	3.616.835.472	49.964.310.472
40	DINAS ESDM	501.238.000	11.330.477.000	2.711.300.000	14.543.015.000
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.706.815.500	5.372.764.500	6.940.560.000	14.020.140.000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.454.805.000	5.378.849.000	18.678.462.815	27.512.116.815
	JUMLAH	152.074.644.150	245.731.013.335	426.957.313.703	824.762.971.188

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	JUMLAH			
		SEBELUM PERUBAHAN			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
1	DINAS PENDIDIKAN	8.423.297.000	12.398.036.600	61.641.625.100	82.462.958.700
2	DINAS KESEHATAN	27.873.227.800	31.112.607.586	51.214.614.454	110.200.449.840
3	RSUD dr R. SOETRASNO	35.285.355.000	33.983.645.000	22.150.042.376	91.419.042.376
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	4.965.349.000	25.631.720.500	176.705.837.548	207.302.907.048
5	BAPPEDA	3.046.082.000	4.400.350.000	144.000.000	7.590.432.000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.467.200.000	2.431.875.000	776.791.000	4.675.866.000
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	563.990.000	997.247.000	1.882.253.000	3.443.490.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.200.330.000	1.462.335.800	374.976.000	3.037.641.800
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	2.744.579.000	5.419.897.310	1.852.340.000	10.016.816.310
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.893.483.000	4.236.763.500	1.468.381.500	7.598.628.000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	1.927.993.000	3.485.889.749	16.679.484.000	22.093.366.749
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2.068.085.000	1.872.467.000	49.917.000	3.990.469.000
13	SATPOL PP	1.419.355.000	1.127.992.000	4.579.370.000	7.126.717.000
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	833.925.000	4.231.675.000	931.400.000	5.997.000.000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
17	SETDA	16.492.845.000	13.845.098.500	6.347.496.500	36.685.440.000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	9.457.800.000	1.945.200.000	22.000.000	11.425.000.000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	257.350.000	713.361.500	27.488.500	998.200.000
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	1.519.300.000	2.926.034.000	16.266.000	4.461.600.000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)	317.875.000	3.020.833.000	6.051.292.000	9.390.000.000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	389.450.000	1.161.490.000	99.200.000	1.650.140.000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	1.499.215.000	1.954.635.000	21.150.000	3.475.000.000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)	767.100.000	675.350.000	28.050.000	1.470.500.000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	786.405.000	964.045.000	64.550.000	1.815.000.000
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	1.498.350.000	484.150.000	17.500.000	2.000.000.000
18	SEKRETARIAT DPRD	3.399.163.000	17.635.634.000	88.774.000	21.123.571.000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.986.978.000	7.256.093.000	3.350.550.000	15.593.621.000
a	(SKPD)	4.986.978.000	7.256.093.000	3.350.550.000	15.593.621.000
b	(PPKD)				-
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	3.970.360.000	1.697.430.000	390.800.000	6.058.590.000
21	BKD	2.294.895.000	4.626.667.000	199.500.000	7.121.062.000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	473.405.000	745.485.000	263.630.000	1.482.520.000
23	KECAMATAN REMBANG	591.836.000	708.759.000	1.574.285.000	2.874.880.000
24	KECAMATAN KALIORI	140.926.000	426.378.000	175.000.000	742.304.000
25	KECAMATAN SULANG	322.239.000	416.405.000	58.000.000	796.644.000
26	KECAMATAN SUMBER	177.220.000	404.885.000	110.995.000	693.100.000
27	KECAMATAN BULU	171.025.000	253.135.000	339.400.000	763.560.000
28	KECAMATAN LASEM	184.414.000	441.770.000	123.920.000	750.104.000
29	KECAMATAN PANCUR	206.700.000	281.900.000	241.000.000	729.600.000
30	KECAMATAN SLUKE	193.446.000	248.654.000	277.500.000	719.600.000
31	KECAMATAN PAMOTAN	275.345.000	346.115.000	136.900.000	758.360.000
32	KECAMATAN GUNEM	248.632.000	401.228.000	110.500.000	760.360.000
33	KECAMATAN SALE	275.705.000	386.025.000	95.000.000	756.730.000
34	KECAMATAN KRAGAN	299.613.000	656.800.000	130.213.000	1.086.626.000
35	KECAMATAN SEDAN	265.050.000	261.470.000	232.700.000	759.220.000
36	KECAMATAN SARANG	200.150.000	326.750.000	322.500.000	849.400.000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN	1.148.003.000	2.670.667.200	2.405.557.800	6.224.228.000
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	355.710.000	1.260.870.000	596.700.000	2.213.280.000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	2.429.794.000	48.741.221.000	3.707.920.472	54.878.935.472
40	DINAS ESDM	482.688.000	11.493.027.000	2.717.300.000	14.693.015.000
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.640.916.000	5.478.339.000	4.881.335.000	12.000.590.000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.401.205.000	5.976.749.000	18.553.162.815	27.931.116.815
	JUMLAH	138.340.513.800	259.780.056.745	387.881.671.565	786.002.242.110

V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 26 September 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
BADAN ANGGARAN**

Ketua,

Sekretaris

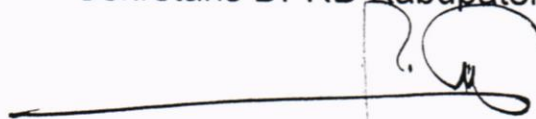
Ttd

ttd

H. MAJID KAMIL MZ

Drs. ACHMAD MUALIF

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang



Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

PENDAPAT AKHIR

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

**RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2016**



**DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Hari : SENIN, 26 SEPTEMBER 2016
Dibacakan Oleh : MOKAMMAD ZAENURI**

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

JL. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212 Rembang



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2016

Kamis , 26 September 2016

Dibacakan oleh : MOKAMMAD ZAENURI

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat siang , dan Salam sejahtera bagi kita semua

*Bismillah., Alhamdulillah., Assholatu Wassalamu a'la Rosulilla., Wa'alaa alihi wasohbihi
wamawwalah., laahaula walaa quwwata illabillah..., Amma ba'da.....*

Yang kami hormati :

=> Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

=> Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.

=> Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.

- => sdr. Pj. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf . Dan..
- => Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, serta semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami menyampaikan Pendapat akhir ini, terlebih dahulu marilah kita, selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir dalam Rapat Paripurna ini , dalam keadaan sehat Wal afiat tidak kurang suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita MUHAMMAD SAW , dan para shahabat , beserta seluruh keluarganya.

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian Pendapat akhir kami , terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang tahun 2016, setelah mendengarkan jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan oleh sdr. Bupati , dalam rapat paripurna ke II , pada hari Selasa , tanggal 20 September 2016 , terhadap Pemandangan Umum Fraksi , dan selanjutnya dilakukan pembahasan melalui rapat-rapat di Komisi , bersama dengan SKPD terakait , Rapat Banggar dan Pimpinan Komisi , dan Rapat Banggar dengan TAPD , Alkhamdulillah semua dapat berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan , meskipun harus dengan lembur sampai waktu larut tengah malam .

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang mendalam, dari hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah , tentang Perubahan APBD tahun 2016 ini, kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan , ***Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrochiim menerima dan menyetujui*** , RAPERDA Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 ini , menjadi PERDA Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 , dengan segala perubahan dan pergeseran yang ada , di dalam pembahasannya.

Di dalam Pendapat akhir ini , ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan , sebagai usulan dan masukan , antara lain sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Rencana Pelaksanaan Pilkades serentak , bahwa dirasa kekosongan Kepala desa definitive ini sudah cukup lama , hingga sudah hampir 2 (dua) tahun , dan menurut pendapat kami , sebagai landasan hukum yang ada, sudah mencukupi untuk dijadikan dasar pelaksanaan , Maka kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mohon, kepada Pemerintah Kabupten Rembang, agar Pelaksanaan Pilkades Serentak benar-benar dilaksanakan di tahun 2016 .
2. Sesuai hasil rapat di tingkat Komisi bersama SKPD , dalam pembahasan telah disepakati bahwa, program kegiatan yang tercantum didalam Rancangan Perubahan APBD tahun 2016 ini, adalah prioritas kegiatan yang 95 % dapat dilaksanakan, maka sehubungan dengan hal tersebut , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta kepada Pemkab , agar komitmen yang sudah disepakati untuk dilaksanakan.
3. Berkaitan dengan KUA / PPAS Induk Tahun Anggaran 2017 , yang beberapa saat waktu mendatang harus segera kita lakukan pembahasan , mohon kepada Pemkab Rembang , agar TAPD segera menyusun Rancangan KUA / PPAS tersebut, dan mengirimkan ke DPRD , untuk selanjutnya segera dilakukan pembahasan.
4. Dalam rangka menunjang peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat perdesaan , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mohon, kepada Pemkab Rembang , agar Program Pembangunan di Tahun Anggaran 2017, banyak diprioritaskan pada :
 - a. Sarana Perhubungan yang baik dan lancar , yakni Perbaikan dan Peningkatan Jalan antar Kecamatan , dan Jalan antar desa .
 - b. Sarana Penunjang Pertanian yang baik dan berfungsi , yakni Revitalisasi Jaringan Irigasi , Perbaikan dan Pembangunan Embung atau Bendung , serta Peningkatan SDA (Sumber Daya Air).

Demikian Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 ini , Semoga kita selalu diberikan hidayah , kemudahan, dan kelancaran, sehingga apa yang kita rencanakan dapat berhasil dan bermanfaat, untuk Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang tercinta.

Trima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

Wallahul Muwaffiq Ilaa aqwamitthoorik

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 26 September 2016

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA



SUGIHARTO



SEKRETARIS



ZAIMULUMAM NS

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
HASIL PEMBAHASAN
RAPERDA PERUBAHAN APBD
TAHUN 2016**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Rembang, 26 SEPTEMBER 2016
Dibacakan oleh : MUGIYARTO, S.T.**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194; 693290; 693291

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA PERUBAHAN APBD
TAHUN 2016**

SENIN, 26 SEPTEMBER 2016

Dibacakan oleh : MUGIYARTO, S.T.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang dan Salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
4. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
5. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama Staff
6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi Demokrat, sebagai insan beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga kita masih diberi kesehatan sehingga kita semua dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD ini dalam rangka penyampaian

pendapat akhir fraksi terhadap hasil pembahasan Raperda APBD tahun 2016

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Syukur alhamdulillah tahapan demi tahapan pembahasan mulai awal sampai selesai berjalan dengan baik dan lancar.

Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohiimi kami Fraksi Demokrat menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun 2016 menjadi PERDA Perubahan APBD Tahun 2016.

Setelah kita menyetujui Raperda ini menjadi Perda Kami Fraksi Demokrat berharap supaya dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan tuntas dan jangan sampai ada yang tertinggal lagi.

Dengan penyampaian pendapat akhir Fraksi Demokrat ini, Kami kembali memberikan beberapa saran, pendapat, dan masukan demi kebaikan Kabupaten Rembang yang kita cintai ini, antara lain :

1. Kami Fraksi Demokrat berharap supaya Pemerintah Kabupaten Rembang menginventarisasi/mendata dan menertibkan semua aset yang tidak bergerak diwilayah Kabupaten Rembang terutama pendataan jalan poros Desa, jalan antar Kecamatan, jalan Kabupaten maupun jalan Provinsi, dimana data tersebut diatas merupakan media untuk menentukan proses kegiatan yang bersifat infrastruktur atau fisik, ini juga menjadi salah satu indikator untuk pencapaian predikat WTP (wajar tanpa pengecualian)
2. Kami Fraksi Demokrat berharap kepada Pemerintah Kabupaten Rembang supaya menginstruksikan kepada semua Kepala SKPD untuk segera menjalankan apa yang sudah kita rencanakan, karena ini merupakan tolak ukur penilaian bagi masyarakat, dimana seorang pimpinan bisa profesional dalam menjalankan tugas dan wewenang terhadap permasalahan yang sangat krusial dimata Masyarakat Rembang yang kita cintai ini.

3. Kami Fraksi Demokrat juga berharap agar content dan selalu meningkatkan koordinasi secara horisontal maupun secara vertikal terhadap masing-masing institusi atau lembaga Pemerintahan Negara guna mencapai Rembang yang membangun, aman, sejahtera secara lahir batin (membangun manusia seutuhnya)

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 26 September 2016

FRAKSI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

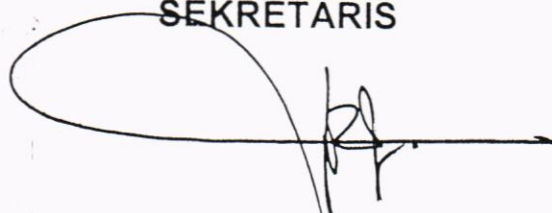
KABUPATEN REMBANG

KETUA



EKA SISWA KARTIKA

SEKRETARIS



IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Pendapat AKhir

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAB BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016**

disampaikan oleh Wasiman

pada sidang paripurna DPRD kabupaten Rembang, senin 26 september 2016



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Pendapat AKhir

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2016**

disampaikan oleh Wasiman
pada sidang paripurna DPRD kabupaten Rembang
Senin 26 September 2016

Assalamu 'alaikum wr. wb.

- ❖ Yang Terhormat Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- ❖ Yang Kami Hormati Saudara, Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Rembang
- ❖ Yang Kami Hormati Saudara, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang
- ❖ Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- ❖ Yang kami Hormati, Saudara Plt. Sekretaris Daerah dan calon Sekretaris Daerah serta Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.
- ❖ Yang kami Hormati, kawan-kawan pers, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah , segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk menyimak Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2016.

Sidang Dewan dan Hadirin yang berbahagia.....

Perkenankan Kami menyampaikan Selamat Hari Tani yang telah kita peringati kemarin pada tanggal 24 September semoga sebagai Negaradan Daerah Agraris kita mampu menjaga dan menegaskan kapasitas ketahanan pangan yang telah diwariskan oleh nenek moyang.

Kami juga sampaikan Selamat hari Statistik yang tepat kita peringati hari ini tanggal 26 September , semoga kita mampu menyusun data-data secara akurat agar dapat bertindak berdasarkan realita, berbicara karena fakta, dan merencanakan berdasarkan fakta-fakta.Semoga angka-angka yang disajikan bagi pembangunan Rembang semakin akurat. Dan besok pada tanggal 27 September kita akan memperingati hari Pos , Telekomunikasi Telegraf (PTT) , dan pada tanggal 28 September Memperingati Hari Kereta Api . Semoga ada Reaktualisasi dan pembaharuan didalamnya.

Sidang Dewan yang kami Hormati.....

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh saudara Bupati dalam jawabannya terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, meskipun masih ada beberapa hal yang belum dijelaskan secara lengkap pada prinsipnya kami dapat memahami kondisi di Pemerintahan Kabupaten Rembang.

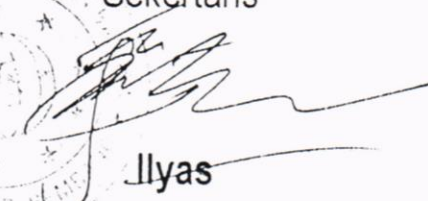
Untuk itu dengan mengucapkan ***Bismillahirrohmannirrohim*** Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapat menerima Raperda ini untuk selanjutnya dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah .

Demikian Pendapat Akhir kami , dan sebagai penutup kami sampaikan himbauan agar dalam perubahan nama dari Rembang Bangkit menjadi Rembang Madani yang sekarang sudah dilombakan lagu Rembang Madani dapat memenuhi prosedur dan Regulasi yang ada.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang , 26 September 2016

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Rembang

Ketua		Sekretaris
		
Muhammad Imron		Ilyas

PENDAPAT AKHIR FRAKSI

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



PDI PERJUANGAN



PARTAI NasDem

Hari / Tanggal : Senin / 26 September 2016

Tentang :

RAPERDA APBD PERUBAHAN TAHUN 2016

KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2016



**FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Kode pos 59212 Rbg.

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Hari / Tanggal : Senin / 26 SEPTEMBER 2016

TENTANG : RAPERDA PERUBAHAN APBD 2016

Dibacakan Oleh :

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kab. Rembang

Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) Kab. Rembang

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab. Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang

Para Tamu Undangan yang Berbahagia.

Yang Terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang beserta jajaran dan staf.

Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang hadir pada sidang hari ini yang kami hormati

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI MULYAKAN,

Alhamdulillah puji sukur kami panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan rahmat NYA sehingga kita bisa menghadiri sidang Paripurna pada siang ini tanpa halangan dengan agenda pembacaan Pemandangan Umum Fraksi terkait Raperda APBD Perubahan tahun 2016. Sholawat dan Salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah melewati tahapan demi tahapan dalam pembahasan Raperda APBD Perubahan TA. 2016 dengan jadwal yang begitu padat, akhirnya pada hari ini sesuai agenda yang telah ditetapkan maka ijinilah kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi catatan dan rekomendasi kami dalam Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan Nasdem, diantaranya :

1. Pemkab Rembang kami harap agar penyerapan anggaran di bidang fisik dan infrastruktur bisa ditingkatkan menjadi minimal 90% , ini untuk meningkatkan infrastruktur di kab. Rembang. Karena kami melihat infrastruktur di Kab. Rembang masih jauh tertinggal dari Kabupaten sekitar, terutama akses jalan antar desa ataupun jalan antar kecamatan yang semakin rusak. Jelas ini sangat tidak mendukung mobilitas daripada masyarakat.
2. Untuk Dinas Pendidikan kami mendorong untuk bekerja keras dalam mengoptimalkan penyerapan DAK, sehingga tidak ada lagi berita gedung sekolah yang rusak dan yang tidak layak digunakan. Dan Dinas Pendidikan juga dapat mengupayakan kesejahteraan tenaga honorer.
3. Untuk Rumah Sakit Dr. R. Soetrasno kami menghimbau lebih meningkatkan pelayanan karena masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang kurang optimal. Kami juga berharap pihak Rumah Sakit menambah tenaga medis dan sarana prasarana karena kami lihat tenaga medis dan sarana prasarana di Rumah Sakit masih kurang mencukupi terutama dokter jaga di tiap-tiap bangsal.
4. Kami mengharap saudara Bupati untuk bisa mengakomodir bagi hibah bansos yang belum masuk dalam lampiran SKT Bupati.
5. Kami berharap saudara Bupati untuk secepatnya merealisasikan sistem CMS (Cash Management System) bagi pembayaran hasil tangkap nelayan.

6. Dalam rangka meyejahterakan petani dan nelayan kami berharap saudara Bupati untuk segera melakukan pendataan dalam rangka pemberian BPJS ketenagakerjaan untuk nelayan dan petani, sehingga bisa dianggarkan di Anggaran induk tahun 2017 nanti.

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI MULYAKAN.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan Nasdem, dengan segala pertimbangan dan dengan menyebut “ Bismillahirrohmanirrohim ” kami menyatakan **menyetujui** Raperda APBD Perubahan TA 2016 ini untuk diundangkan menjadi Perda APBD TA 2016. Semoga akan memberikan manfaat bagi kita dan masyarakat Rembang pada umumnya. Terima kasih

Wassalamu alaikum Wr, Wb.

Merdeka !!!

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

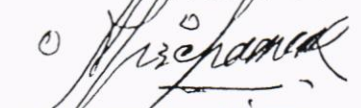
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT



KETUA


JASMANI

SEKRETARIS


ALI IRCHAM ST

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

ATAS

**RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016**



REMBANG, 26 SEPTEMBER 2016



**FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA
(GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl.P.Diponegoro No.88 Rembang (0295) 691194 Kode Pos 59251**

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG TERHADAP
RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2016**

Disampaikan oleh : H.YUDIANTO, S.H
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Senin 26 September 2016

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

SALAM INDONESIA RAYA...

Yang terhormat Saudara BUPATI dan Wakil Bupati Rembang.

Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD dan segenap anggota Dewan.

Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Yang kami hormati Saudara Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat se Kabupaten Rembang

Yang Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia

Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi, dalam kesempatan ini tidak lupa kami mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kepada ILLAHI ROBBI atas segala karunia dan nikmat NYA yang tiada henti. Sholawat dan salam teruntuk Baginda Nabi Muhammad SAW segenap para nabi dan rasul ILLAHI.

Hadirin sidang paripurna yang kami Hormati,

Setelah melalui berbagai tahapan dalam pembahasan anggaran perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2016, dalam Rapat Komisi-Komisi, Rapat Banggar, dan Rapat Fraksi, Kami sampaikan catatan penting sebagai berikut :

- Fraksi Gerindra mengharapkan Pemerintah Kabupaten Rembang segera melaksanakan Kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Perda ABPD baik induk maupun Perubahan Tahun 2016. Hal ini kami tegaskan agar supaya laju Pembangunan Daerah di Kabupaten Rembang tidak terhambat, Penyerapan Anggaran juga berjalan baik dan masyarakat bisa menikmati pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraanya.
- Fraksi Gerindra Perlu Mengingatkan Kepada Yang terhormat Sdr.Bupati dan Wakil Bupati , bahwa saat ini diwilayah Kabupaten Rembang diujung Barat dan Selatan telah terjadi aktifitas yang menggembirakan sekaligus mencemaskan bagi masyarakat yang tinggal diwilayah Kecamatan Sumber dan Kaliori yaitu adanya Rencana Penambangan atau Ekplorasi tambang gas atau minyak bumi , tepatnya diwilayah Desa Krikilan Kecamatan Sumber , karena hingga saat ini dan detik ini masih minimnya sosialisasi terkait Rencana Ekplorasi tersebut yang harusnya melibatkan segenap masyarakat , tokoh masyarakat diwilayah tersebut khususnya dan Rembang pada umumnya, kami saja yang Notabene adalah tokoh masyarakat diwilayah tersebut tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam sosialisasi terkait rencana persiapan Ekplorasi ataupun Ekplorasi terhadap tambang gas / tambang minyak tersebut , bahkan hanya sekedar pemberitahuan terhadap Institusi kami yaitu DPRD Kabupaten Rembang tidak pernah dilakukan .kami hanya khawatir kalau Ekplorasi tambang tersebut nantinya adalah Ekplorasi tambang gas . Trauma kejadian Tragedi bencana Lapindo yang telah meluluhlantakkan dan menyengsarakan masyarakat Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya akibat Ekplorasi Tambang Gas tidak terulang kembali di bumi Pertiwi Kabupaten Rembang tercinta, untuk itu kami Fraksi Gerindra Meminta kepada PemKab Rembang untuk senantiasa berhati -- hati dalam memberikan segala bentuk Fasilitas terhadap pihak -- pihak yang berkompetensi terhadap Rencana kegiatan Ekplorasi tambang gas / Minyak bumi tersebut , agar kedepan keberadaan kegiatan Ekplorasi tambang tersebut betul -- betul bisa

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Rembang dan bukan malah menimbulkan Mudhorot / Bencana bagi masyarakat Rembang dan yang tidak kalah penting bisa memberikan pendapatan yang sebesar – besarnya bagi Pemerintah Kabupaten Rembang.

Demikian pendapat akhir kami, dengan mengucapkan **Bismillahirrohmanirrohim**, kami menerima Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 untuk ditetapkan menjadi Perda. Atas segala kekurangannya disampaikan permohonan maaf dan terima kasih. Semoga Allah SWT selalu menunjukan jalan yang benar dan terbaik bagi kita semua, Semoga Tahun 2016 ini **lebih baik** dari Tahun 2015 kemarin, sehingga kita termasuk dalam golongan orang yang beruntung. Amiiin...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 26 September 2016

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
GERAKAN INDONESIA RAYA
FRAKSI

HERI KURNIAWAN, SE.

Ketua

FUJI SANTOSO, SP. MH.

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PENDAPAT FRAKSI KARYA SEJAHTERA DPRD KABUPATEN REMBANG

terhadap
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TA. 2016

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Rembang

Hari Senin, 26 September 2016

Assalamu'alaikum wa rohmatullohi wa barokatuh.

Yang kami hormati

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- Saudara Pimpinan dan semua Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Saudara Penjabat Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di kalangan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Para hadirin yang kami muliakan.

Segala puji bagi Allah yang melimpahkan taufik rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk, bimbingan dan keselamatan kepada kita semua dalam mengemban amanah selaku abdi masyarakat dan abdi negara.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Setelah melalui pembahasan antara komisi-komisi bersama SKPD terkait dan dilanjutkan pembahasan antara TAPD bersama Banggar DPRD maka saatnya kami menyampaikan Pendapat Fraksi Karya Sejahtera terhadap Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang TA 2016 sbb.

- Sampai akhir Agustus 2016 ini penyerapan APBD 2016 oleh SKPD, terutama anggaran pembangunan, masih kurang dari 35 %. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang belum bekerja secara maksimal untuk melayani masyarakat. Dengan bertambahnya anggaran melalui APBD Perubahan TA 2016 ini, mengingat sisa waktu yang hanya 2 bulan efektif, hendaknya pemerintah bekerja cepat; namun tetap berhati-hati dalam membelanjakan uang rakyat, digunakan sesuai peruntukannya agar tidak terjadi pemborosan atau mengambil untung demi kepentingan pribadi.
- Khusus mengenai TPI (tempat pelalangan ikan), Fraksi Karya Sejahtera merekomendasikan, dalam sistem pembayaran CMS (cash management system) atau sistem pembayaran cash pada pelaksanaan lelang di TPI, jangan hanya diberkakukan pada TPI yang menggunakan sistim lelang terbuka saja tetapi juga pada TPI yang menggunakan sistim lelang tertutup. Mengingat kedua TPI, baik TPI yang menggunakan sistem lelang terbuka maupun TPI yang menggunakan sistim lelang tertutup, sama-sama memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Rembang.

Pimpinan rapat dan hadirin yang terhormat.

Dengan catatan tadi, Fraksi Karya Sejahtera ***menyetujui*** RAPERDA ini ditetapkan sebagai PERDA Perubahan APBD Kabupaten Rembang TA. 2016.

Menutup pendapat fraksi ini kami mengutip piwulang Sri Sunan Pakubuwono IV sbb:

*“Dhedhasaring angasto negari,
kudu bener kudu lantip,
sepi pamrih den kaesti,
pesunen sariranira,
jejeging adil den udi”.*

artinya: Syarat untuk mengelola negara adalah kejujuran dan kecakapan, mengesampingkan kepentingan pribadi, mengendalikan hawa nafsu serta menegakkan keadilan.

Bila ada kata-kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pendapat Fraksi Karya Sejahtera kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang.

Rahayu ingkang samya pinanggih - Wassalamu'alaikum wa rohmatullohi wa barokatuh.

DPRD KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,

H. ISMARI



Sekretaris,

JOKO SUPRIHADI, SH

FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PENDAPAT AKHIR
TERHADAP
RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2016

Dibacakan Oleh : SAHNINGSIH

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala

Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang.

Camat se Kabupaten Rembang

Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab. Rembang dan
hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun 2016 dalam keadaan sehat.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

1. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran perubahan ini cukup besar, untuk itu kami mengharapkan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk bekerja lebih optimal sehingga target PAD dapat terwujud.
2. Mengingat Tahun Anggaran hanya tersisa 3 (tiga) bulan, kami mengharapkan segenap perangkat daerah untuk dapat tertib waktu, baik dalam penyusunan dokumen, penatausahaan ataupun pelaksanaan kegiatan.
3. Penyerapan anggaran menjadi isu strategis di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Rembang. Tetapi kami meyakini bahwa kita tidak akan berhenti kepada penyerapan anggaran saja, namun juga kualitas pelaksanaan kegiatan/pekerjaan. Kuantitas dan kualitas adalah dua sisi mata uang yang harus selalu kita jaga keseimbangannya, agar dapat mencapai Visi Misi yang telah dicita-citakan bersama.
4. Kami mengajak setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk bersama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan, menjaga dan mengawal program-program pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Harapan dan kami mensepakati Raperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, serta dapat dilaksanakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Semoga pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2016 ini dapat berjalan dengan baik dan tidak lepas dari petunjuk Allah SWT Amin.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 26 September 2016

FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG

Ketua


SUKARMAIN

Sekretaris


SAHNINGSIH, SE



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja, yang menyebabkan sisa lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 menjadi Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
32. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.
41. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Memperhatikan :
1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 26 September 2016 ; .
 2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 26 September 2016;
 3. Pembicaraan-pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 26 September 2016 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 beserta perubahan-perubahannya sebagaimana tersebut dalam Laporan Badan Anggaran untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Bupati Rembang ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 26 September 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua

The image shows a circular official stamp of the Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang. The stamp contains the text "DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG" and "KETUA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "H. MAJID KAMIL MZ" is printed.

H. MAJID KAMIL MZ



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA RAPAT PARIPURNA
PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS HASIL
RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

Rembang, 26 September 2016

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Ykh. - Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Para Ketua Komisi dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Rekan-Rekan Forkopimda Kab. Rembang ;
- Ykh. - Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan
Kabag. di Lingkungan Setda Kabupaten
Rembang ;
- Ykh. - Kepala SKPD se Kab. Rembang ;
- Ykh. - Para Camat dan Hadirin sekalian yang
berbahagia.

Mengawali pertemuan kali ini perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Ridho-Nya-lah kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka **Pendapat Akhir Bupati Atas Hasil Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016**, dalam keadaan sehat wal'fiat.

Kami sampaikan **"terima kasih"** kepada semua pihak, terutama jajaran legislatif yang telah mendukung dan mencurahkan perhatian dengan semangat yang tinggi membahas hingga selesainya proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 sehingga berjalan lancar dan tepat waktu.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pembahasan Raperda perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 yang diselenggarakan bertujuan untuk mengantisipasi perubahan kegiatan dan program-program baru daerah yang tentunya mempengaruhi belanja daerah, selain hal tersebut guna mempercepat program-program pembangunan untuk segera dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menikmati program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD Perubahan) Tahun Anggaran 2016 ini, pada setiap program yang akan dilaksanakan nantinya dapat memberikan *output* dan *outcome* dengan kuantitas dan kualitas yang terencana dan terukur. Hal ini merupakan implementasi dari fungsi perencanaan, fungsi koordinasi dan motivasi serta fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan strategi kinerja Pemerintah Daerah sebagai bentuk manajemen koordinasi yang baik.

Dengan demikian melalui Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 ini

diupayakan seoptimal mungkin untuk dapat menampung aspirasi berbagai program dan kegiatan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu, dengan perubahan anggaran ini diharapkan dapat menyempurnakan program atau kegiatan yang sudah berjalan maupun yang belum teranggarkan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016, sehingga dapat mempercepat pencapaian tahapan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebelum Rancangan Peraturan Daerah ini ditetapkan, kita bersama telah melaksanakan koordinasi dan pembahasan yang sistematis dan terencana baik pada tingkat komisi maupun Badan Anggaran, dalam rangka untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap setiap perencanaan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam program dan kegiatan, serta besaran Rancangan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Rancangan Peraturan daerah ini akan menjadi pedoman dan rujukan kebijakan kita pada tahun 2016 ini dalam melaksanakan aktivitas pemerintah dan pembangunan Kabupaten Rembang diberbagai sektor. Untuk itu, saya tetap optimis bahwa kebijakan anggaran yang telah disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dapat kita manfaatkan secara efektif untuk memacu pembangunan dan pertumbuhan perekonomian demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang yang kita cintai ini.

Adapun Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD tahun 2016 sebesar Rp.1.490.592.742.455,- (***Satu trilliun empat ratus sembilan puluh milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah***), pada APBD tahun 2016 sejumlah Rp. 1.596.566.692.500,- (***Satu trilliun lima ratus sembilan puluh enam milyar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh***

dua ribu lima ratus rupiah). Maka terjadi penurunan sebesar Rp.105.973.950.045,- (*Seratus lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu empat puluh lima rupiah*).

Selanjutnya, untuk belanja daerah pada Rancangan Perubahan Belanja APBD Tahun 2016 sebesar Rp.1.874.875.616.260,- (*Satu trilliun delapan ratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh rupiah*) dibanding anggaran belanja daerah pada APBD tahun 2016 sebesar Rp.1.937.216.565.110,- (*Satu trilliun sembilan ratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus enam belas juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah*), maka terjadi penurunan sebesar Rp. 62.340.948.850,- (*Enam puluh dua milyar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).

Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2016 terdapat defisit sebesar Rp.384.282.873.805,- (*Tiga ratus delapan puluh empat milyar dua ratus delapan puluh dua juta*

delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah), yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar Rp. 384.282.873.805,- (**Tiga ratus delapan puluh empat milyar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah**), sehingga pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2016 menjadi balance.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Melalui rapat Paripurna ini, sekali lagi saya atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang mengucapkan **terima kasih** kepada saudara Pimpinan dan segenap Anggota Dewan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta seluruh Pimpinan SKPD beserta staf yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan penyusunan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 ini.

Berbagai masukan, saran, dan kritik konstruktif yang disampaikan Badan Anggaran maupun lintas Komisi DPRD semoga dapat digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintah

daerah, utamanya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Rembang.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang. *Amin, amin, ya Robbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang



H. ABDUL HAFIDZ



BERITA ACARA

NOMOR : 900 15/7/ 2016

NOMOR : 900 12054/ 2016

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

Pada Hari ini *senin* tanggal *dua puluh enam* bulan *September* Tahun *Dua Ribu Enam Belas* kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ABDUL HAFIDZ : Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang beralamat di jalan P. Diponegoro No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. H. MAJID KAMIL MZ : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
3. H. BISRI CHOLIL LAQUF : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
4. SUMARSIH : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini;

2. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 26 September 2016

BUPATI REMBANG


H. ABDUL HAFIDZ



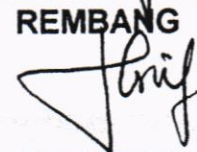
**KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**

H. MAJID KAMIL MZ

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**


M. BISRI CHOLIL LAQUF

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**


SUMARSIH